



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KESEHATAN

T.A 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi selama Tahun Anggaran 2025 serta sebagai implementasi dari penerapan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja organisasi serta realisasi penggunaan anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

LKjIP ini juga diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bagi organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Yahukimo.

Sumohai, 27 Maret 2025

Pit. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN YAHUKIMO



ASER SOBOLIM, S.K.M
PEMBINA. Tk.I
NIP. 197108091993121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah khususnya di bidang kesehatan. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta penguatan sistem kesehatan daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Dinas Kesehatan telah menetapkan sasaran strategis yang menjadi fokus pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo meliputi meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk serta meningkatnya mutu fasilitas kesehatan. Sasaran tersebut diukur melalui beberapa indikator kinerja utama antara lain Nilai Evaluasi SAKIP OPD, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Prevalensi Stunting, Persentase Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah serta Persentase Akreditasi Puskesmas.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan **4 (empat) program**, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp180.419.430.959,00** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Yahukimo. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain kondisi geografis wilayah yang luas dan sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, serta keterbatasan tenaga kesehatan di beberapa wilayah distrik.

Oleh karena itu, melalui penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo selama Tahun Anggaran 2025 sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun yang akan datang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Tugas dan Fungsi	
C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
D. Permasalahan Isu Strategis	
E. Sistematika Penyajian	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Reviu Rencana Strategis	
B. Indikator Kinerja Utama.....	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2025	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	
B. Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN :	
1. IKU 2021-2026 Dinas Kesehatan	
2. RKT Dinas Kesehatan Tahun 2025	
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan kesehatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, peningkatan gizi masyarakat, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan di daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan efisien kepada masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi SAKIP adalah penyusunan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi informasi mengenai pencapaian kinerja instansi pemerintah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. LKjIP juga menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran.

LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan

kinerja, capaian kinerja organisasi, serta realisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Selain itu, penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan adanya LKJIP ini diharapkan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Yahukimo dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan, pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan, pengelolaan sumber daya kesehatan, serta pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi beberapa unit organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis pembangunan kesehatan daerah;
- perencanaan dan pengembangan program kesehatan masyarakat;
- pengorganisasian dan pengendalian pelaksanaan program kesehatan;
- pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- pelaksanaan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan program dan rencana kerja dinas;
- pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
- pelaksanaan urusan umum dan kearsipan;
- koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional. Bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan;
- peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan. Fungsi yang diselenggarakan antara lain:

- perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
- pelaksanaan surveilans dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
- penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan;
- pengawasan kualitas lingkungan dan sanitasi.

e. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan khusus, serta peningkatan gizi masyarakat. Bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan masyarakat;
- pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan dasar;

- pembinaan pelayanan kesehatan khusus;
- peningkatan status gizi masyarakat.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya kesehatan yang meliputi tenaga kesehatan, kefarmasian, serta sarana dan prasarana kesehatan. Fungsi yang dilaksanakan antara lain:

- perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya kesehatan;
- pembinaan pelayanan kefarmasian;
- pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
- pengawasan penggunaan sarana dan prasarana kesehatan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis, seperti Puskesmas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

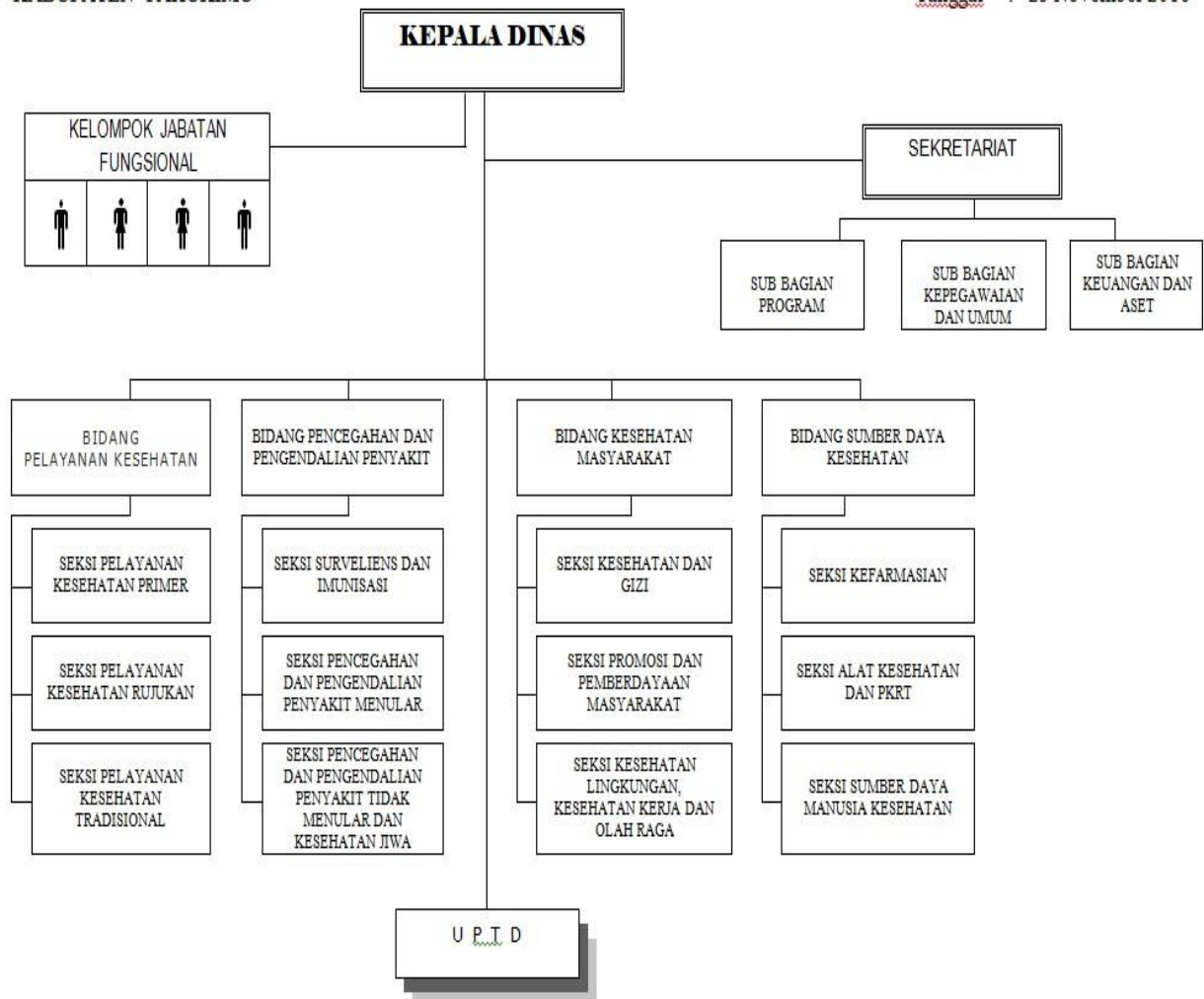
Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo terdiri dari Kepala Dinas yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi dinas, Sekretariat yang melaksanakan fungsi administrasi dan koordinasi internal, serta beberapa bidang teknis yang melaksanakan urusan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya kesehatan. Selain itu, terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat di

wilayah kerjanya serta kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo dapat dilihat pada gambar berikut.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : Peraturan Bupati Yahukimo
Nomor : 27 Tahun 2016
Tanggal : 23 November 2016



1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Yahukimo masih menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, serta keterbatasan sumber daya manusia kesehatan. Kabupaten Yahukimo merupakan wilayah dengan karakteristik geografis pegunungan yang sebagian besar wilayahnya sulit dijangkau melalui jalur transportasi darat. Kondisi ini menyebabkan

akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi terbatas, terutama bagi masyarakat yang berada di distrik-distrik terpencil.

Salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi adalah masih tingginya angka kesakitan dan kematian penduduk, khususnya **angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita**. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan akses pelayanan kesehatan, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta keterbatasan tenaga kesehatan di beberapa wilayah pelayanan kesehatan.

Selain itu, permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah masih tingginya **prevalensi stunting** pada anak balita. Stunting merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi gizi kronis yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Upaya penanganan stunting memerlukan keterlibatan berbagai sektor serta peningkatan intervensi gizi yang berkelanjutan, baik melalui pelayanan kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam upaya pemenuhan standar mutu fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini terlihat dari masih perlunya peningkatan **akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan**, baik rumah sakit maupun puskesmas, sebagai upaya untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan tenaga kesehatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Yahukimo. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata serta keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di beberapa distrik menyebabkan pelayanan kesehatan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat secara optimal.

Selain faktor sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Beberapa fasilitas pelayanan kesehatan masih memerlukan peningkatan sarana pendukung pelayanan kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penguatan program kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

Permasalahan dan isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.

1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai kondisi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Bab ini terdiri dari latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis, serta sistematika penyajian laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis organisasi serta perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Pada bab ini disajikan reviu rencana strategis, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja tahun berjalan serta perencanaan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja organisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo yang diukur berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, perkembangan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, serta keterkaitan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Selain itu, pada bab ini juga disajikan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja organisasi. Pada bagian akhir bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo selama Tahun Anggaran 2025 serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pada

masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Reviu Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo merupakan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan dalam periode perencanaan tertentu. Renstra menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2021–2026 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

a. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Yahukimo adalah:

“Membangun Dengan Hati Mewujudkan Yahukimo Yang Baru, Aman, Damai, Sehat, Cerdas dan Berintegritas.”

Visi tersebut menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik yang baik, serta terciptanya kondisi daerah yang aman, damai dan berintegritas.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Yahukimo menetapkan beberapa misi pembangunan daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo melaksanakan dan mendukung pencapaian **Misi 1**, yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya.”

Melalui misi tersebut, Dinas Kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan akses pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta peningkatan gizi masyarakat.

c. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian misi pembangunan daerah tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan.

Tujuan pembangunan kesehatan daerah adalah:

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan sistem kesehatan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis yang menjadi fokus pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, yaitu:

- 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan.**
- 2. Menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk serta meningkatnya mutu fasilitas kesehatan.**

Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui beberapa indikator kinerja yang mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Yahukimo.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo telah menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi. Indikator tersebut mencerminkan capaian kinerja di bidang tata kelola pemerintahan serta pembangunan kesehatan masyarakat.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat
2	Menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk serta meningkatnya mutu fasilitas kesehatan	Angka Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas dalam satu tahun per 100.000 kelahiran hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data kesehatan ibu dan anak
		Angka Kematian Bayi	Jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun dalam satu tahun per 1.000 kelahiran hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data kesehatan ibu dan anak
		Angka Kematian Balita	Jumlah kematian anak usia di bawah 5 tahun dalam satu tahun per 1.000 kelahiran hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data kesehatan ibu dan anak
		Prevalensi Stunting	Persentase balita pendek dan sangat pendek terhadap jumlah balita	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data gizi balita
		Persentase Akreditasi RS Pemerintah	Jumlah rumah sakit pemerintah yang terakreditasi dibandingkan dengan jumlah rumah sakit yang ada di daerah	RSUD Dekai	Data akreditasi RS
		Persentase Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang telah terakreditasi dibandingkan dengan jumlah puskesmas di kabupaten	Bidang Pelayanan Kesehatan	Data akreditasi puskesmas

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian kinerja disusun sebagai bentuk komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 mengalami perubahan sebagai tindak lanjut dari adanya pergeseran anggaran pada Tahun Anggaran 2025. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan program, kegiatan, serta alokasi

anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 disesuaikan dengan program, kegiatan, indikator kinerja serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran daerah.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	61(B)
2	Menurunnya angka dan kesakitan penduduk kematian serta meningkatnya mutu kesehatan	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	139,6
		Angka Kematian Bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	14,0
		Angka Kematian Balita	Per 1000 Kelahiran Hidup	26,2
		Prevalensi Stunting	Persentase (%)	17
		Persentase Akreditasi RS Pemerintah	Persentase (%)	100
		Persentase Akreditasi Puskesmas	Persentase (%)	78,79
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya				
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,80

2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2025, total anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp184.450.973.667**, dan setelah dilakukan perubahan anggaran menjadi sebesar **Rp180.419.530.959**

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan **4 (empat) program utama** yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Adapun rincian alokasi anggaran berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.3
Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 51.947.264.859	Rp 51.947.264.859
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 121.451.594.808	Rp 118.993.232.108
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 11.052.114.000	Rp 7.802.114.000
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 1.676.819.992	Rp 1.676.819.992
Jumlah		Rp 184.450.973.667	Rp 180.419.530.959

Program-program tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang berfokus pada peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan.

Selain itu, sebagian besar alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo pada Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk mendukung **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**, yang mencakup penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas.

Dengan adanya dukungan anggaran tersebut diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan dapat berjalan secara optimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan Daerah (RPJMD)

Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo melaksanakan Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Yahukimo yaitu *“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya.”* Dalam kerangka pelaksanaan misi tersebut, sektor kesehatan menjadi salah satu unsur utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu indikator utama yang digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Indikator ini mencerminkan rata-rata umur yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir dengan mempertimbangkan pola mortalitas yang terjadi pada suatu wilayah.

Angka Harapan Hidup juga merupakan salah satu komponen utama dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi umur panjang dan hidup sehat. Oleh karena itu, peningkatan AHH menjadi salah satu fokus utama pembangunan kesehatan daerah.

Dalam konteks ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo merupakan perangkat daerah (OPD) pemangku utama yang bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian indikator tersebut melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, upaya promotif dan preventif, serta peningkatan kualitas fasilitas kesehatan.

Tabel 3.1
Perbandingan Angka Harapan Hidup Tahun 2024–2025

Wilayah	AHH (Tahun)
Indonesia	74,47
Provinsi Papua Pegunungan	67,55
Kabupaten Yahukimo	66,90

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa **Angka Harapan Hidup Kabupaten Yahukimo masih berada di bawah rata-rata nasional**, namun relatif mendekati rata-rata Provinsi Papua Pegunungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Yahukimo masih cukup besar, terutama

terkait aksesibilitas pelayanan kesehatan, kondisi geografis yang sulit, serta keterbatasan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.

Namun demikian, apabila dilihat dari tren beberapa tahun terakhir, AHH Kabupaten Yahukimo menunjukkan kecenderungan **peningkatan yang bertahap**, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan dasar di daerah.

Tabel 3.2
Tren Angka Harapan Hidup Kabupaten Yahukimo

Tahun	AHH (Tahun)
2022	66,31
2023	66,42
2024	66,90

Tren tersebut menunjukkan adanya peningkatan meskipun relatif kecil, yang mencerminkan bahwa intervensi kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3.1.2 Kontribusi Dinas Kesehatan terhadap Pencapaian AHH (RPJMD → Renstra)

Untuk mendukung pencapaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo menetapkan sasaran strategis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo.

Dalam RPJMD Kabupaten Yahukimo, indikator Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur pencapaian sasaran pembangunan daerah pada aspek meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini juga merupakan bagian dari komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan dimensi umur panjang dan hidup sehat masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo sebagai perangkat daerah teknis (OPD pemangku urusan kesehatan) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian indikator tersebut melalui pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, upaya promotif dan preventif, pengendalian penyakit, serta peningkatan kualitas sumber daya kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 3.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	61 (B)
2	Menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk serta meningkatnya mutu fasilitas kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	139,6 per 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB)	14,0 per 1.000 KH
		Angka Kematian Balita (AKABA)	26,2 per 1.000 KH
		Prevalensi Stunting	17 %
		Persentase Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah	100%
		Persentase Akreditasi Puskesmas	78,79

3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

<p>SASARAN STRATEGIS 1</p> <p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan</p>
--

a. Indikator Kinerja Utama : Nilai Evaluasi SAKIP OPD

Indikator Nilai Evaluasi SAKIP OPD digunakan untuk mengukur tingkat kinerja organisasi dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo serta tingkat akuntabilitas, profesionalisme, dan tata kelola OPD.

Kategori nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

- **AA:** Nilai > 90 – 100 (Sangat Baik)
- **A:** Nilai > 80 – 90 (Baik Sekali)

- **BB:** Nilai > 70 – 80 (Baik)
- **B:** Nilai > 60 – 70 (Cukup Baik)
- **CC:** Nilai > 50 – 60 (Cukup)
- **C:** Nilai > 30 – 50 (Kurang)
- **D:** Nilai > 0 – 30 (Sangat Kurang)

Target nilai SAKIP tahun 2025 ditetapkan **61 (B)**, yang berada pada kategori **Cukup Baik**.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	61	Menunggu LHE Inspektorat	-

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa **realisasi nilai SAKIP tahun 2025 masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Daerah**, sehingga nilai resmi (Laporan Hasil Evaluasi/LHE) belum ditetapkan.

Meskipun demikian, pelaksanaan penguatan SAKIP telah dilakukan sepanjang tahun 2025 melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran indikator kinerja, serta penguatan pelaporan kinerja perangkat daerah.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023	2024	2025 (Target)
Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	59,19 (B)	60,08 (B)	61 (B)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa **terdapat tren peningkatan nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo secara bertahap**.

- Tahun 2023: 59,19 (kategori B/Cukup)
- Tahun 2024: 60,08 (kategori B/Cukup Baik)
- Tahun 2025 (target): 61 (kategori B/Cukup Baik)

Peningkatan ini menunjukkan adanya **perbaikan berkelanjutan** dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal organisasi.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo terhadap target akhir yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026.

Dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, target akhir indikator Nilai Evaluasi SAKIP OPD ditetapkan sebesar 65 (kategori B / Cukup Baik) pada akhir periode perencanaan.

Perbandingan antara target jangka menengah Renstra dengan capaian tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra (Akhir 2026)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Renstra (%)
Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	65 (B)	61 (B)	Menunggu LHE	-

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa target jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo sebesar 65 (kategori B) belum dapat diukur secara penuh pada tahun 2025 karena nilai realisasi masih menunggu hasil evaluasi resmi dari Inspektorat (LHE SAKIP).

Namun demikian, apabila dilihat dari tren capaian tahun sebelumnya, yaitu 59,19 (2023) dan 60,08 (2024), maka target 65 pada akhir periode Renstra masih dapat dicapai secara bertahap melalui penguatan implementasi SAKIP pada tahun-tahun berikutnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo masih berada pada jalur pencapaian (on track) terhadap target jangka menengah Renstra, dengan catatan perlunya konsistensi dalam peningkatan kualitas:

- perencanaan kinerja yang lebih terukur dan berbasis outcome,
- penguatan indikator kinerja utama,
- peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta
- penguatan evaluasi internal secara berkala.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, terlihat adanya tren peningkatan dari tahun 2023 sebesar 59,19 menjadi 60,08 pada tahun 2024, serta target tahun 2025 sebesar 61 (kategori B / Cukup Baik). Meskipun nilai tahun 2025 masih menunggu hasil evaluasi resmi (LHE) Inspektorat, secara umum menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kinerja dalam implementasi SAKIP.

a. Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kinerja SAKIP Dinas Kesehatan antara lain:

- **Penguatan perencanaan kinerja berbasis indikator**
Penyusunan Renja dan Perjanjian Kinerja telah semakin mengarah pada indikator yang terukur dan selaras dengan RPJMD serta Renstra.
- **Peningkatan komitmen pimpinan OPD**
Adanya komitmen dari pimpinan dan jajaran dalam mendorong implementasi manajemen kinerja berbasis SAKIP.
- **Peningkatan koordinasi internal**
Koordinasi antara sekretariat, bidang, dan subbagian dalam penyusunan laporan kinerja semakin baik.

b. Kendala atau Faktor Penghambat

Meskipun terdapat peningkatan, masih terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi implementasi SAKIP, antara lain:

- **Belum optimalnya kualitas indikator kinerja pada beberapa program**
Masih terdapat indikator yang berfokus pada output dan belum sepenuhnya outcome oriented.
- **Keterbatasan pemahaman teknis SAKIP pada sebagian aparatur**
Hal ini berdampak pada variasi kualitas penyusunan dokumen kinerja.
- **Belum optimalnya integrasi data kinerja**

Data kinerja antar bidang belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu.

- **Proses evaluasi internal yang masih perlu diperkuat**

Evaluasi kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik.

c. Alternatif Solusi yang Telah dan Akan Dilakukan

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo telah dan akan melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

- **Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis SAKIP**

Untuk meningkatkan pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Upaya ini dilaksanakan melalui bimbingan teknis serta pendampingan implementasi SAKIP yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo, sehingga diharapkan kualitas dokumen kinerja dan pemahaman aparatur terhadap manajemen kinerja semakin meningkat.

- **Penguatan quality assurance dokumen kinerja**

Melalui review berjenjang terhadap Renja, Perjanjian Kinerja, dan laporan kinerja sebelum ditetapkan.

- **Peningkatan integrasi data kinerja berbasis digital**

Untuk memastikan data kinerja lebih akurat, konsisten, dan mudah dievaluasi. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan sistem E-SAKIP Reviu (ESR) sebagai media penyimpanan, pengelolaan, dan pelaporan data kinerja secara terintegrasi, sehingga proses monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik. Penguatan monitoring dan evaluasi internal secara berkala.

5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.

Pencapaian kinerja SAKIP tidak dapat dilepaskan dari dukungan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada

kegiatan yang berkaitan dengan penguatan perencanaan, penganggaran, pelaporan, evaluasi kinerja, serta penataan organisasi perangkat daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, dukungan terhadap pencapaian sasaran strategis ini dialokasikan melalui program penunjang dengan fokus pada kegiatan administrasi perencanaan, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, serta kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah.

a. Perbandingan Kinerja dan Anggaran

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Nilai Evaluasi SAKIP OPD	61 (B)	Menunggu LHE	-	51.947.264.859	49.880.927.253

b. Analisis Efisiensi

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian indikator SAKIP dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- **Efisiensi Anggaran**

Penggunaan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah difokuskan pada kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pelaporan SAKIP, serta penguatan tata kelola organisasi.

Realisasi anggaran sebesar **Rp49.880.927.253 (96,02%)** menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan relatif optimal dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik, karena sebagian output tetap dapat dicapai meskipun tidak seluruh pagu terserap.

- **Efisiensi Sumber Daya Manusia**

Pelaksanaan SAKIP didukung oleh aparatur yang memiliki tugas pada bidang perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Pelaksanaan ini juga didukung oleh koordinasi lintas bidang serta pendampingan teknis dari **Bagian Organisasi Sekretariat Daerah**, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan tanpa penambahan signifikan sumber daya manusia.

- **Efisiensi Proses Kerja**

Proses pengelolaan kinerja telah mulai diarahkan pada sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis digital melalui **E-SAKIP Reviu (ESR)**. Pemanfaatan sistem ini meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data kinerja, mengurangi duplikasi pelaporan, serta mempercepat proses monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Selain itu, integrasi data dengan sistem perencanaan daerah juga semakin diperkuat melalui SIPD sehingga mendukung konsistensi data kinerja.

c. **Kesimpulan Efisiensi**

Secara umum, penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian indikator **Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo** telah dilaksanakan secara **efektif dan efisien**.

Hal ini ditunjukkan oleh:

- Dukungan anggaran yang memadai dengan tingkat realisasi 96,02%,
- Optimalisasi sumber daya aparatur melalui koordinasi lintas bidang,
- Serta penerapan sistem digital (ESR) yang meningkatkan kualitas dan kecepatan pengelolaan kinerja.

Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya pada Tahun 2025 telah mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal, meskipun nilai SAKIP masih menunggu hasil evaluasi resmi (LHE Inspektorat).

6. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini menjadi instrumen utama dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, program tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp 51.947.264.859,00, dengan realisasi sebesar Rp 49.880.927.253,00

atau sebesar 96,02%. Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan nilai SAKIP.

a. Rincian Program dan Kegiatan Pendukung SAKIP

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51.947.264.859	49.880.927.253	96,02
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.000.000	164.000.000	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.184.864.859	49.279.147.253	96,28
Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.390.000	292.280.000	92,97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.000.000	0	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.000.000	145.500.000	76,98
Penataan Organisasi	32.010.000	0	0,00

b. Rincian Program dan Kegiatan Pendukung SAKIP

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**
menjadi komponen utama dalam mendukung peningkatan nilai SAKIP, khususnya melalui penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian, serta pelaporan kinerja perangkat daerah secara berkala.
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
mendukung aspek akuntabilitas keuangan yang menjadi salah satu unsur penilaian dalam SAKIP, terutama terkait kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi anggaran.

- **Administrasi Umum dan Penyediaan Jasa Penunjang**

berperan dalam menjamin kelancaran operasional organisasi, sehingga proses administrasi kinerja dapat berjalan secara tertib dan terdokumentasi dengan baik.

- **Penataan Organisasi dan Pengadaan Barang Milik Daerah**

masih belum terealisasi secara optimal pada tahun berjalan, sehingga menjadi salah satu area perbaikan dalam peningkatan kualitas tata kelola dan efektivitas dukungan SAKIP ke depan.

c. Kesimpulan Analisis Program

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pendukung SAKIP telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.

Hal ini ditunjukkan oleh:

- Tingkat realisasi anggaran program penunjang sebesar 96,02%,
- Optimalnya pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja (100%),
- Serta dukungan administrasi keuangan dan umum yang berjalan cukup baik.

Dengan demikian, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian dan peningkatan nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.

SASARAN STRATEGIS 2

**Menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk
serta meningkatnya mutu fasilitas kesehatan**

A. Indikator Kinerja Utama : Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat, khususnya keberhasilan pelayanan kesehatan ibu dalam menurunkan risiko kematian pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Indikator ini merupakan indikator *negative outcome*, sehingga semakin rendah nilai AKI maka semakin baik tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu daerah.

Angka Kematian Ibu juga merupakan salah satu indikator utama dalam RPJMD Kabupaten Yahukimo yang mencerminkan sasaran "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat", serta menjadi bagian penting dalam pengukuran kinerja sektor kesehatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo sebagai OPD pemangku urusan kesehatan.

Pengukuran AKI pada prinsipnya dinyatakan dalam jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dalam periode tertentu.

Pada tahun 2025, target AKI Kabupaten Yahukimo ditetapkan sebesar **139,6 per 100.000 kelahiran hidup**, sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan daerah.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Berdasarkan rekapitulasi data fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Yahukimo tahun 2025, diperoleh data sebagai berikut:

- Jumlah kematian ibu: 19 kasus
- Jumlah kelahiran hidup: 502 kelahiran

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	139,6	3.785*	-

**Realisasi dihitung berdasarkan data operasional fasilitas pelayanan kesehatan (19 kematian ibu dari 502 kelahiran hidup) dan digunakan sebagai data pemantauan internal Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.*

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara perhitungan operasional, nilai AKI Kabupaten Yahukimo tahun 2025 masih berada di atas target yang telah ditetapkan. Namun demikian, angka tersebut merupakan data berbasis fasilitas pelayanan kesehatan (*facility-based data*) yang digunakan untuk pemantauan program kesehatan ibu dan anak, dan belum sepenuhnya menggambarkan AKI populasi secara statistik nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penurunan angka kematian ibu masih memerlukan penguatan intervensi pada aspek pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam peningkatan akses pelayanan, kualitas pertolongan persalinan, serta sistem rujukan kegawatdaruratan maternal.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) secara tren tahunan belum dapat disajikan secara lengkap karena keterbatasan ketersediaan data historis yang terdokumentasi secara konsisten pada tahun 2023 dan 2024.

Namun demikian, data tahun 2025 dapat dijadikan sebagai **data baseline (tahun dasar)** dalam pengukuran kinerja penurunan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Yahukimo ke depan.

Pada tahun 2025, berdasarkan rekapitulasi data fasilitas pelayanan kesehatan, tercatat:

- Jumlah kematian ibu: **19 kasus**
- Jumlah kelahiran hidup: **502 kelahiran**
- Angka Kematian Ibu (AKI): **3.785 per 100.000 kelahiran hidup (hasil perhitungan operasional)**

Realisasi AKI Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 (Data Tersedia)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023	2024	2025
Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	-	-	3.785

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa data AKI Kabupaten Yahukimo yang tersedia secara terdokumentasi baru dapat disajikan pada tahun 2025. Oleh karena itu, analisis tren belum dapat dilakukan secara komprehensif dalam tiga tahun terakhir.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pencatatan dan pelaporan data kesehatan ibu secara berkelanjutan dan terintegrasi, sehingga ke depan dapat dilakukan analisis tren kinerja yang lebih akurat dalam mendukung pengambilan kebijakan.

Meskipun demikian, data tahun 2025 tetap menjadi dasar penting dalam evaluasi awal kinerja penurunan AKI di Kabupaten Yahukimo dan menjadi acuan dalam penguatan intervensi program kesehatan ibu dan anak pada tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) terhadap target

akhir yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.

Dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, target akhir penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) ditetapkan sebesar **69,8 per 100.000 penduduk**. Target ini merupakan arah kebijakan jangka menengah daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan sistem rujukan, serta peningkatan kesiapsiagaan pelayanan kegawatdaruratan maternal.

Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi AKI Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian
Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	69,8	3.785*	Belum Tercapai

**Realisasi dihitung berdasarkan data operasional fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Yahukimo tahun 2025 (19 kematian ibu dari 502 kelahiran hidup).*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Yahukimo tahun 2025 masih berada di atas target akhir Renstra yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator AKI masih belum sesuai dengan arah target jangka menengah yang diharapkan.

Kesenjangan antara target dan realisasi tersebut mengindikasikan bahwa upaya penurunan AKI masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses pelayanan kesehatan di wilayah geografis yang sulit dijangkau, keterlambatan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal, serta belum optimalnya pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, diperlukan penguatan intervensi secara berkelanjutan dan terintegrasi untuk mendukung pencapaian target akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Yahukimo tahun 2025, tercatat 19 kasus kematian ibu yang tersebar di beberapa wilayah fasilitas pelayanan kesehatan.

Namun demikian, berdasarkan data kasus yang tersedia, informasi penyebab kematian ibu belum seluruhnya terdokumentasi secara lengkap dan seragam menggunakan klasifikasi diagnosis yang terstandar, sehingga analisis penyebab dilakukan berdasarkan data yang dapat diidentifikasi dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan.

a. Analisis Penyebab Kematian Ibu

Dari data yang tersedia, penyebab kematian ibu yang dapat diidentifikasi antara lain:

- Perdarahan postpartum (postpartum haemorrhage)
- Eklampsia
- Hipertensi dalam kehamilan
- Infeksi maternal yang mempersulit kehamilan
- Plasenta previa
- Komplikasi masa nifas (puerperium complications)
- Komplikasi obstetri lainnya yang tidak terklasifikasi secara rinci

Dari pola tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kematian ibu berkaitan dengan komplikasi obstetri yang sebenarnya dapat dicegah apabila mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan secara cepat dan tepat.

Namun demikian, karena keterbatasan kelengkapan data penyebab pada seluruh kasus, maka analisis ini masih bersifat parsial berdasarkan kasus yang teridentifikasi secara klinis dalam laporan fasilitas kesehatan.

b. Sebaran Kasus Berdasarkan Wilayah

Kasus kematian ibu tahun 2025 terjadi di beberapa wilayah, antara lain:

- Distrik Dekai
- Distrik Mugi
- Distrik Silimo
- Distrik Seredela

- Distrik Langda
- Distrik Nalca
- Distrik Kabianggama
- RSUD

Sebaran kasus menunjukkan bahwa kematian ibu terjadi secara merata di beberapa wilayah pelayanan kesehatan, sehingga permasalahan AKI bersifat sistemik dan tidak terlokalisasi pada satu wilayah tertentu.

c. Faktor Non-Medis yang mempengaruhi

Selain faktor medis, terdapat faktor determinan lain yang turut berkontribusi terhadap kejadian kematian ibu, yaitu:

- Keterbatasan akses geografis dan transportasi rujukan
- Keterlambatan dalam pengambilan keputusan mencari pertolongan
- Keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan
- Keterbatasan tenaga kesehatan di beberapa fasilitas
- Keterbatasan layanan emergensi obstetri di fasilitas kesehatan tertentu

d. Alternatif Solusi yang Telah dan Akan Dilakukan

Untuk menurunkan angka kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo telah dan terus melakukan upaya strategis, antara lain:

- Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) melalui peningkatan deteksi dini risiko kehamilan.
- Penguatan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan obstetri.
- Penguatan layanan emergensi di fasilitas kesehatan (penanganan perdarahan, eklampsia, dan komplikasi lainnya).
- Peningkatan edukasi masyarakat tentang tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas.
- Penguatan audit maternal perinatal (AMP/MPDN) untuk perbaikan kualitas layanan kesehatan.

Kesimpulan : Kematian ibu di Kabupaten Yahukimo tahun 2025 sebagian besar disebabkan oleh komplikasi obstetri yang bersifat preventable, namun analisis

lebih rinci masih terbatas karena belum seluruh kasus memiliki dokumentasi penyebab yang lengkap. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kematian ibu serta peningkatan kualitas layanan kegawatdaruratan maternal secara berkelanjutan.

5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara capaian kinerja indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dengan pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Yahukimo.

Indikator AKI merupakan indikator outcome yang menggambarkan keberhasilan pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam upaya menurunkan kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas

a. Perbandingan Kinerja dan Anggaran

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiens
Angka Kematian Ibu (AKI)	139,6 per 100.000 KH	19 kasus kematian ibu	Belum tercapai	Rp4.385.400.000	Rp1.000.000.000,00	Belum optimal (berdasarkan outcome)

Anggaran tersebut merupakan dukungan langsung melalui **Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak** pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

• Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2025, sektor kesehatan Kabupaten Yahukimo didukung oleh anggaran sebesar Rp 180.419.430.959 dengan realisasi Rp 122.270.991.753. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung layanan kesehatan ibu dan anak melalui:

- pelayanan antenatal (ANC),
- persalinan di fasilitas kesehatan,
- penguatan sistem rujukan,

- penyediaan fasilitas dan obat-obatan,
- serta operasional pelayanan kesehatan dasar di puskesmas melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Meskipun dukungan anggaran cukup besar, penurunan angka kematian ibu masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi **outcome**, efisiensi penggunaan anggaran masih belum optimal dan memerlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

- **Efisiensi Sumber Daya Manusia**

Pelayanan kesehatan ibu dan anak telah didukung oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan RSUD. Namun masih terdapat kendala: distribusi tenaga kesehatan belum merata, keterbatasan tenaga terlatih kegawatdaruratan obstetric serta kebutuhan peningkatan kompetensi penanganan kasus risiko tinggi.

- **Efisiensi Proses Pelayanan**

Pelayanan kesehatan ibu telah dilaksanakan melalui sistem pelayanan berjenjang. Namun efektivitas masih dipengaruhi oleh keterlambatan rujukan kasus obstetri, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau serta keterbatasan sarana transportasi medis.

c. **Kesimpulan Efisiensi**

Secara umum, penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Yahukimo telah dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang cukup besar. Namun, dari sisi hasil (outcome), efisiensi belum optimal karena angka kematian ibu masih berada di atas target yang ditetapkan dalam Renstra.

Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya, tidak hanya dari aspek anggaran, tetapi juga penguatan kualitas layanan, distribusi tenaga kesehatan, serta sistem rujukan kegawatdaruratan maternal secara terpadu.

6. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Yahukimo dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dukungan terhadap indikator AKI dapat dibedakan menjadi dukungan langsung dan dukungan tidak langsung.

a. Dukungan Program dan Kegiatan Secara Langsung

Program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan upaya penurunan angka kematian ibu adalah Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak yang berada pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai aktivitas pelayanan kesehatan ibu, antara lain:

- **Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita**, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu mengenai kesehatan kehamilan, persalinan yang aman, perawatan bayi baru lahir, serta pencegahan komplikasi selama masa kehamilan dan persalinan.
- **Pendampingan pemberian makanan bayi dan anak**, termasuk pemberian ASI eksklusif, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan guna meningkatkan status gizi ibu dan anak serta mendukung tumbuh kembang bayi dan balita secara optimal.
- **Pemberian hibah kepada Tim Posyandu Kabupaten Yahukimo**, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat kampung melalui kegiatan pemantauan kesehatan ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, memperkuat peran kader kesehatan, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat masyarakat.

b. Dukungan Program dan Kegiatan Secara Tidak Langsung

Program Selain kegiatan yang secara spesifik berfokus pada kesehatan ibu, pencapaian indikator AKI juga didukung oleh berbagai kegiatan lain dalam sektor kesehatan yang bersifat lintas pelayanan kesehatan, antara lain:

- penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di fasilitas kesehatan;
- peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
- serta penguatan sistem rujukan pelayanan kesehatan.

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak secara khusus ditujukan untuk indikator AKI, namun berperan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan secara umum, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

c. Kesimpulan Analisis Program

Secara umum, dukungan program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI) masih terbatas pada sub kegiatan pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak. Sementara itu, sebagian besar program dan kegiatan lainnya memberikan dukungan secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan program yang lebih terfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu, khususnya dalam upaya deteksi dini risiko kehamilan, peningkatan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan, serta penguatan sistem rujukan kegawatdaruratan materna

SASARAN STRATEGIS 2

**Menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk
serta meningkatnya mutu fasilitas kesehatan**

B. Indikator Kinerja Utama : Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun dalam satu tahun tertentu per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan bayi baru lahir, serta mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah.

Tingginya angka kematian bayi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, kualitas pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, serta faktor lingkungan dan status gizi bayi. Oleh karena itu, indikator Angka Kematian Bayi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah.

Tujuan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, khususnya pelayanan neonatal, serta sebagai dasar dalam perencanaan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Yahukimo.

Formula perhitungan indikator Angka Kematian Bayi adalah sebagai berikut:

$$\text{AKB} = (\text{Jumlah Kematian Bayi Usia} < 1 \text{ Tahun} / \text{Jumlah Kelahiran Hidup}) \times 1.000$$

Keterangan: Jumlah kematian bayi adalah jumlah bayi lahir hidup yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dan Jumlah kelahiran hidup adalah jumlah bayi yang lahir hidup pada tahun yang sama.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2021–2026, target Angka Kematian Bayi tahun 2025 ditetapkan sebesar:

14,0 per 1.000 kelahiran hidup

Berdasarkan data Tabel Bantu AMPSR Kabupaten Yahukimo Tahun 2025, jumlah kematian bayi dengan status lahir hidup tercatat sebanyak 12 kasus. Sementara itu, berdasarkan data pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2025, jumlah bayi baru lahir (kelahiran hidup) di Kabupaten Yahukimo tercatat sebanyak 1.278 bayi.

Dengan demikian, perhitungan Angka Kematian Bayi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\text{AKB} = (12 / 1.278) \times 1.000$$

AKB = 9,39 per 1.000 kelahiran hidup

Nilai tersebut menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi di Kabupaten Yahukimo tahun 2025 berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	14,0	9,39	148,99%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Akhir Renstra

Dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2021–2026, target akhir indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 7,0 per 1.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan hasil perhitungan, realisasi Angka Kematian Bayi Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 tercatat sebesar 9,39 per 1.000 kelahiran hidup, yang diperoleh dari jumlah kematian bayi lahir hidup sebanyak 12 kasus dari total 1.278 kelahiran hidup.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 7,0 per 1.000 kelahiran hidup, maka capaian tahun 2025 telah berada di bawah target akhir yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Yahukimo telah menunjukkan hasil yang baik dan mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan daerah.

Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian
Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	9,39	7,0	Belum mencapai target akhir Renstra

Realisasi Angka Kematian Bayi Kabupaten Yahukimo tahun 2025 sebesar **9,39 per 1.000 kelahiran hidup** masih berada di atas target akhir Renstra sebesar **7,0 per 1.000 kelahiran hidup**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian indikator telah berada di bawah target tahunan, namun upaya penurunan angka kematian bayi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan bayi, khususnya pelayanan neonatal dan penanganan bayi dengan risiko tinggi, perlu terus diperkuat melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bayi sesuai standar serta penguatan sistem rujukan neonatal.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Yahukimo tahun 2025. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Angka Kematian Bayi tahun 2025 tercatat sebesar 9,39 per 1.000 kelahiran hidup, yang masih berada di atas target akhir Renstra sebesar 7,0 per 1.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan data Tabel Bantu AMPSR Kabupaten Yahukimo Tahun 2025, jumlah kematian bayi lahir hidup tercatat sebanyak 12 kasus, dengan berbagai penyebab kematian yang berkaitan dengan kondisi kesehatan bayi sejak masa kelahiran hingga periode neonatal.

b. Penyebab Kematian Bayi

Berdasarkan data diagnosis penyebab kematian bayi tahun 2025, sebagian besar kematian bayi terjadi pada masa neonatal (usia sangat dini setelah kelahiran). Penyebab kematian bayi yang paling banyak ditemukan antara lain:

1) Asfiksia Lahir (Birth Asphyxia)

Asfiksia lahir merupakan kondisi bayi yang mengalami kesulitan bernapas saat lahir. Kondisi ini sering terjadi akibat proses persalinan yang tidak optimal atau keterlambatan penanganan pada saat kelahiran.

2) Bayi Berat Lahir Rendah dan Prematuritas

Kematian bayi juga disebabkan oleh bayi yang lahir dengan berat badan rendah atau lahir sebelum waktunya (prematurnya). Bayi dengan kondisi tersebut memiliki daya tahan tubuh yang rendah serta berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan pada masa awal kehidupan.

3) Infeksi pada Bayi Baru Lahir

Beberapa kasus kematian bayi disebabkan oleh infeksi, seperti pneumonia kongenital dan infeksi neonatal lainnya. Infeksi pada bayi baru lahir dapat terjadi akibat kondisi kesehatan ibu selama kehamilan maupun faktor lingkungan setelah kelahiran.

4) Gangguan Pernapasan Bayi Baru Lahir

Gangguan pernapasan seperti respiratory distress juga menjadi salah satu penyebab kematian bayi. Kondisi ini sering terjadi pada bayi prematur atau bayi dengan komplikasi saat kelahiran.

5) Trauma Lahir dan Kelainan Kongenital

Sebagian kasus kematian bayi juga disebabkan oleh trauma saat persalinan serta kelainan bawaan (kongenital) yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi sejak lahir.

c. Kendala yang Masih Dihadapi

- Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Yahukimo.
- Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan akses pelayanan kesehatan di beberapa wilayah terpencil yang memiliki kondisi geografis sulit dijangkau. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam penanganan bayi dengan risiko tinggi, terutama pada saat proses persalinan maupun setelah kelahiran.
- Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, khususnya peralatan penanganan kegawatdaruratan neonatal, juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bayi.
- Keterbatasan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan bayi baru lahir serta masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan bayi sesuai standar juga menjadi faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini. Berdasarkan data tahun 2025, bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar baru mencapai **46%**, sehingga masih diperlukan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bayi di seluruh wilayah kerja puskesmas.

d. Alternatif Solusi yang Telah dan Akan Dilakukan

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan angka kematian bayi, beberapa langkah strategis telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.

Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir melalui pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar, meningkatkan pelaksanaan deteksi dini terhadap bayi dengan risiko tinggi, serta memperkuat sistem rujukan neonatal agar bayi dengan kondisi kegawatdaruratan dapat segera mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan.

Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan penanganan bayi baru lahir serta peningkatan pemantauan kesehatan bayi melalui kegiatan kunjungan rumah dan pelayanan posyandu. Upaya peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bayi sesuai standar juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Yahukimo.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara capaian indikator **Angka Kematian Bayi (AKB)** dengan pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Yahukimo.

Indikator Angka Kematian Bayi merupakan indikator outcome yang menggambarkan keberhasilan pelayanan kesehatan bayi, khususnya pada masa neonatal dan bayi usia kurang dari satu tahun. Berdasarkan hasil perhitungan, Angka Kematian Bayi Kabupaten Yahukimo tahun 2025 tercatat sebesar **9,39 per 1.000 kelahiran hidup**, yang masih berada di atas target akhir Renstra sebesar **7,0 per 1.000 kelahiran hidup**.

Pelaksanaan indikator ini didukung melalui kegiatan pelayanan kesehatan bayi yang dilaksanakan melalui **Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bayi serta menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Yahukimo.

a. Perbandingan Kinerja dan Anggaran

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Sub Kegiatan Pendukung	Anggaran (Rp)
Angka Kematian Bayi (AKB)	14,0 per 1.000 KH	9,39	Tercapai	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp1.000.000.000

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- **Efisiensi Anggaran**

Pelaksanaan indikator Angka Kematian Bayi pada tahun 2025 didukung melalui **Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp1.000.000.000**.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang meliputi pemeriksaan kesehatan bayi segera setelah lahir, pemantauan kondisi kesehatan bayi, pelayanan neonatal dasar, serta penanganan bayi dengan risiko komplikasi.

Dengan capaian indikator sebesar **9,39 per 1.000 kelahiran hidup**, yang berada di bawah target tahunan sebesar **14,0 per 1.000 kelahiran hidup**, penggunaan anggaran pada sub kegiatan tersebut dapat dikategorikan **efisien**, karena target tahunan berhasil dicapai.

- **Efisiensi Sumber Daya Manusia**

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan bayi baru lahir, pemantauan kesehatan bayi, serta penanganan kasus neonatal yang membutuhkan pelayanan segera.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di beberapa wilayah terpencil yang mempengaruhi pemerataan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

- **Efisiensi Proses Pelayanan**

Pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan segera setelah bayi lahir serta pemantauan kondisi bayi pada masa neonatal. Pelayanan tersebut dilaksanakan secara berjenjang melalui fasilitas pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi secara terintegrasi mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir serta berkontribusi terhadap penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Yahukimo.

c. Kesimpulan Efisiensi

Secara umum, penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian indikator **Angka Kematian Bayi (AKB)** di Kabupaten Yahukimo tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target tahunan indikator Angka Kematian Bayi.

Pemanfaatan anggaran melalui **Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir** sebesar **Rp1.000.000.000** telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Namun demikian, peningkatan kualitas pelayanan neonatal serta pemerataan tenaga kesehatan masih perlu dilakukan untuk mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan.

5. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Yahukimo tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir serta deteksi dini risiko kematian bayi.

Program yang mendukung indikator ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, khususnya melalui kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan pelaksanaan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan anggaran sebesar Rp1.000.000.000.

Pelaksanaan sub kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang meliputi pemeriksaan kesehatan bayi segera setelah lahir, pemantauan kondisi kesehatan bayi, pemberian pelayanan neonatal dasar, serta penanganan bayi dengan kondisi risiko tinggi. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bayi.

Keberhasilan pencapaian indikator Angka Kematian Bayi pada tahun 2025 ditunjukkan dengan capaian sebesar 9,39 per 1.000 kelahiran hidup, yang telah memenuhi target tahunan sebesar 14,0 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan bayi

baru lahir telah memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Yahukimo.

Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini, antara lain kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, keterbatasan akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil, serta keterlambatan penanganan kasus bayi dengan kondisi kegawatdaruratan neonatal. Faktor-faktor tersebut masih menjadi tantangan dalam upaya mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator Angka Kematian Bayi telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian bayi. Namun demikian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bayi serta pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo masih perlu terus dilakukan.

SASARAN STRATEGIS 2

**Menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk
serta meningkatnya mutu fasilitas kesehatan**

C. Indikator Kinerja Utama : Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kematian anak usia di bawah lima tahun (0–59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan pelayanan kesehatan anak serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pengukuran indikator Angka Kematian Balita dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Angka Kematian Balita (AKABA) =

(Jumlah Kematian Balita Usia 0–59 Bulan / Jumlah Kelahiran Hidup) × 1.000

Target indikator Angka Kematian Balita Kabupaten Yahukimo tahun 2025 ditetapkan sebesar:

26,2 per 1.000 kelahiran hidup

Karena keterbatasan ketersediaan data kematian balita secara terpisah, penghitungan indikator pada tahun 2025 menggunakan data kematian bayi sebagai pendekatan awal dalam menggambarkan kondisi kematian balita di Kabupaten Yahukimo.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Target indikator **Angka Kematian Balita (AKABA)** Kabupaten Yahukimo tahun 2025 ditetapkan sebesar **26,2 per 1.000 kelahiran hidup** sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kematian bayi yang tercatat pada tahun 2025 sebanyak **25 kasus**, dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak **1.278 bayi**. Karena keterbatasan data kematian balita usia 0–59 bulan secara terpisah, data kematian bayi digunakan sebagai pendekatan awal untuk menggambarkan kondisi kematian balita di Kabupaten Yahukimo.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai Angka Kematian Balita sebesar:

$$(25 / 1.278) \times 1.000 = 19,56 \text{ per 1.000 kelahiran hidup}$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa nilai Angka Kematian Balita tahun 2025 berada di bawah target tahunan yang telah ditetapkan, sehingga indikator ini dapat dikategorikan **tercapai**.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	26,2	19,56	Tercapai

Penghitungan Angka Kematian Balita tahun 2025 menggunakan data kematian bayi sebagai pendekatan awal, karena data kematian balita usia 0–59 bulan secara rinci masih dalam proses pengumpulan dan verifikasi. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran awal terhadap kondisi kematian balita di Kabupaten Yahukimo.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Akhir Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian indikator Angka Kematian Balita telah mendekati target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Target akhir Renstra indikator **Angka Kematian Balita (AKABA)** Kabupaten Yahukimo ditetapkan sebesar **7,0 per 1.000 kelahiran hidup**. Sementara itu, berdasarkan hasil penghitungan menggunakan data yang tersedia pada tahun 2025, nilai Angka Kematian Balita tercatat sebesar **19,56 per 1.000 kelahiran hidup**.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator Angka Kematian Balita tahun 2025 masih berada di atas target akhir Renstra yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan telah tercapai, upaya penurunan angka kematian balita masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target jangka menengah yang telah direncanakan.

Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Selisih
Angka Kematian Balita	19,56	7,0	Belum mencapai target akhir Renstra

Capaian Angka Kematian Balita yang masih berada di atas target akhir Renstra menunjukkan bahwa risiko kematian anak usia balita masih menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Yahukimo. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

Selain itu, cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2025 yang tercatat sebesar 24% menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar balita yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kematian balita apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan balita.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian indikator Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa target tahunan telah tercapai, namun capaian tersebut masih berada di atas target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kematian pada anak usia balita di Kabupaten Yahukimo.

Berdasarkan data kematian bayi yang digunakan sebagai pendekatan dalam analisis kematian balita, penyebab kematian didominasi oleh gangguan kesehatan yang terjadi pada masa neonatal serta kondisi kesehatan bayi dengan risiko tinggi.

Beberapa penyebab kematian yang teridentifikasi antara lain:

- Asfiksia lahir (Birth asphyxia)
- Berat badan lahir rendah dan prematuritas
- Infeksi pada bayi
- Gangguan pernapasan (Respiratory distress)
- Pneumonia kongenital
- Kelainan bawaan (Malformasi kongenital)
- Gangguan pertumbuhan janin dan malnutrisi janin

Selain faktor medis, terdapat beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya kematian balita di Kabupaten Yahukimo, antara lain:

a. Faktor Keterbatasan Akses Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Yahukimo memiliki wilayah geografis yang luas dengan kondisi topografi yang sulit dijangkau, sehingga akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, terutama pada kasus kegawatdaruratan bayi dan balita.

b. Faktor Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar pada tahun 2025 tercatat sebesar 24%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar balita belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan balita berpotensi meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kesehatan yang dapat berujung pada kematian balita.

c. Faktor Kondisi Kesehatan Ibu dan Bayi

Kondisi kesehatan ibu selama masa kehamilan turut mempengaruhi kondisi kesehatan bayi setelah lahir. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah atau prematur memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan yang dapat menyebabkan kematian pada usia dini.

d. Faktor Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat

Masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara optimal pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi secara rutin serta pemanfaatan layanan kesehatan yang tersedia. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus bayi dan balita dengan kondisi risiko tinggi.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara capaian indikator Angka Kematian Balita (AKABA) dengan pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Yahukimo.

Indikator Angka Kematian Balita menggambarkan tingkat keberhasilan pelayanan kesehatan anak usia 0–59 bulan. Berdasarkan hasil penghitungan tahun 2025, diperoleh nilai Angka Kematian Balita sebesar 19,56 per 1.000 kelahiran hidup, yang telah memenuhi target tahunan sebesar 26,2 per 1.000 kelahiran hidup, namun masih berada di atas target akhir Renstra sebesar 7,0 per 1.000 kelahiran hidup.

Pelaksanaan indikator ini didukung melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dengan anggaran sebesar Rp1.276.800.000, yang berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan balita serta penanganan kasus balita dengan risiko kesehatan.

a. Perbandingan Kinerja dan Anggaran

Tabel Perbandingan Kinerja dan Anggaran

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Sub Kegiatan Pendukung	Anggaran (Rp)
Angka Kematian Balita (AKABA)	26,2 per 1.000 KH	19,56	Tercapai	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp1.276.800.000

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan indikator Angka Kematian Balita pada tahun 2025 didukung oleh Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.276.800.000.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan balita, termasuk pemantauan tumbuh kembang balita, pelayanan kesehatan balita sesuai standar, penanganan balita dengan risiko kesehatan, serta pelaksanaan rujukan bagi balita dengan kondisi tertentu.

Berdasarkan data pelayanan kesehatan balita tahun 2025, jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 874 balita dari total 3.664 balita, atau sebesar 24%. Capaian pelayanan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran telah mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan balita, namun cakupan pelayanan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

- Efisiensi Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pelayanan kesehatan balita didukung oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Tenaga kesehatan berperan dalam melakukan pemantauan kesehatan balita, memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar, serta melakukan penanganan awal terhadap balita dengan risiko kesehatan.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di beberapa wilayah terpencil yang menyebabkan belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan balita di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo.

- Efisiensi Proses Pelayanan

Pelayanan kesehatan balita dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita, pelayanan kesehatan balita sesuai standar, serta pelaksanaan rujukan bagi balita dengan kondisi tertentu.

Namun demikian, rendahnya cakupan pelayanan kesehatan balita sebesar 24% menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam proses pelayanan, seperti

keterbatasan akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil serta keterbatasan sarana transportasi medis.

c. Kesimpulan Efisiensi

Secara umum, penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian indikator Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Yahukimo tahun 2025 telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian target tahunan indikator. Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya masih perlu ditingkatkan karena cakupan pelayanan kesehatan balita masih relatif rendah.

Upaya peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya perlu difokuskan pada peningkatan cakupan pelayanan kesehatan balita, pemerataan tenaga kesehatan, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil.

5. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan balita serta pencegahan terjadinya gangguan kesehatan pada anak usia di bawah lima tahun.

Program yang mendukung indikator ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, melalui kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dengan anggaran sebesar Rp1.276.800.000.

Pelaksanaan sub kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas pelayanan kesehatan balita, antara lain pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian pelayanan kesehatan balita sesuai standar, penanganan balita dengan risiko kesehatan, serta pelaksanaan rujukan bagi balita dengan kondisi tertentu. Kegiatan pelayanan kesehatan balita dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Yahukimo.

Selain itu, pelaksanaan pendampingan rujukan balita stunting dan gizi buruk juga menjadi bagian penting dalam upaya menurunkan angka kematian balita. Kegiatan ini mendukung penanganan kasus balita dengan kondisi risiko tinggi secara cepat

dan tepat, sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi kesehatan yang dapat berujung pada kematian balita.

Meskipun target tahunan indikator Angka Kematian Balita telah tercapai, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian target akhir Renstra. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan balita sebesar 24% menunjukkan bahwa sebagian besar balita belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan pada balita yang dapat berdampak pada peningkatan angka kematian balita.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator Angka Kematian Balita telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target tahunan. Namun demikian, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan balita serta pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo masih perlu terus dilakukan.

SASARAN STRATEGIS 2

**Menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk
serta meningkatnya mutu fasilitas kesehatan**

D. Indikator Kinerja Utama : Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah persentase balita yang memiliki tinggi badan di bawah standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya anak usia di bawah lima tahun, dan menjadi salah satu prioritas nasional dalam pembangunan kesehatan. Stunting berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, karena anak yang stunting berisiko mengalami gangguan perkembangan fisik, kognitif, dan produktivitas di masa depan.

Tujuan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai efektivitas program penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo. Pengukuran dilakukan melalui kegiatan pemantauan status gizi balita di posyandu dan puskesmas, kemudian dikompilasi melalui sistem **e-PPBGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Masyarakat)**. Data yang diperoleh menjadi dasar perencanaan intervensi gizi terintegrasi lintas sektor, serta menjadi tolok ukur pencapaian target pembangunan kesehatan daerah.

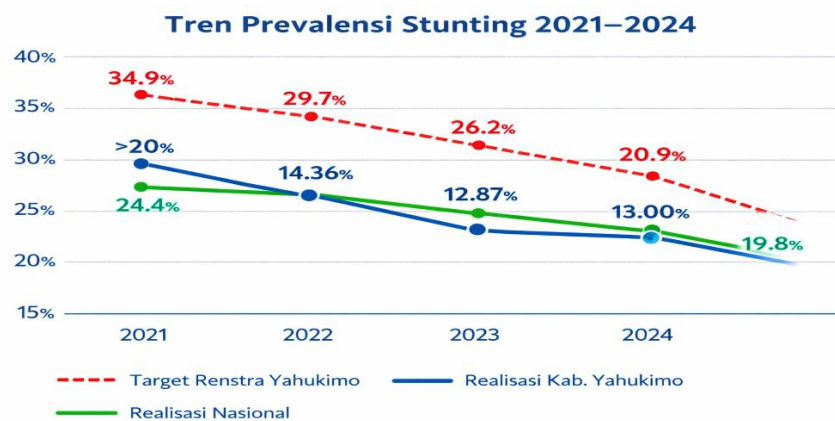
Formula perhitungan prevalensi stunting adalah:

$$Prevalensi = \frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Total Balita Yang Diukur}} \times 100\%$$

di mana jumlah balita stunting merupakan gabungan antara balita dengan status “Sangat Pendek” dan “Pendek”.

Dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo tahun 2021–2026, target penurunan prevalensi stunting ditetapkan menurun bertahap dari 34,9% pada tahun 2021 menjadi 10,5% pada tahun 2026. Target ini sejalan dengan target nasional yang menetapkan prevalensi stunting turun hingga 20,1% pada tahun 2024 dan 19% pada tahun 2025, dengan proyeksi jangka panjang mencapai 14,2% pada tahun 2029.

Berdasarkan hasil pengukuran, tren prevalensi stunting di Kabupaten Yahukimo menunjukkan penurunan konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 prevalensi masih berada di atas 20%, kemudian turun menjadi 14,36% pada tahun 2022, 12,87% pada tahun 2023, dan 13,00% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, prevalensi stunting Indonesia berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tercatat 24,4% pada tahun 2021, 21,6% pada tahun 2022, 21,5% pada tahun 2023, dan 19,8% pada tahun 2024. Dengan demikian, capaian Kabupaten Yahukimo sudah lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, sehingga menunjukkan kinerja daerah yang relatif lebih baik.



Grafik di atas memperlihatkan tren penurunan prevalensi stunting Kabupaten Yahukimo dibandingkan target Renstra dan capaian nasional. Terlihat bahwa sejak tahun 2022, capaian daerah sudah lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, dan tren penurunannya lebih cepat daripada target Renstra maupun target nasional.

Tahun	Target Renstra Yahukimo	Realisasi Yahukimo	Realisasi Nasional (SSGI)
2021	34,9%	>20%	24,4%
2022	29,7%	14,36%	21,6%
2023	26,2%	12,87%	21,5%
2024	20,9%	13,00%	19,8%

Tabel ini memperlihatkan detail angka target dan realisasi. Data menunjukkan konsistensi penurunan di Kabupaten Yahukimo, dengan capaian yang selalu lebih rendah dibandingkan angka nasional sejak tahun 2022. Hal ini menegaskan bahwa program penurunan stunting di daerah berjalan efektif dan melampaui standar nasional.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator Prevalensi Stunting dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program penurunan stunting di Kabupaten Yahukimo.

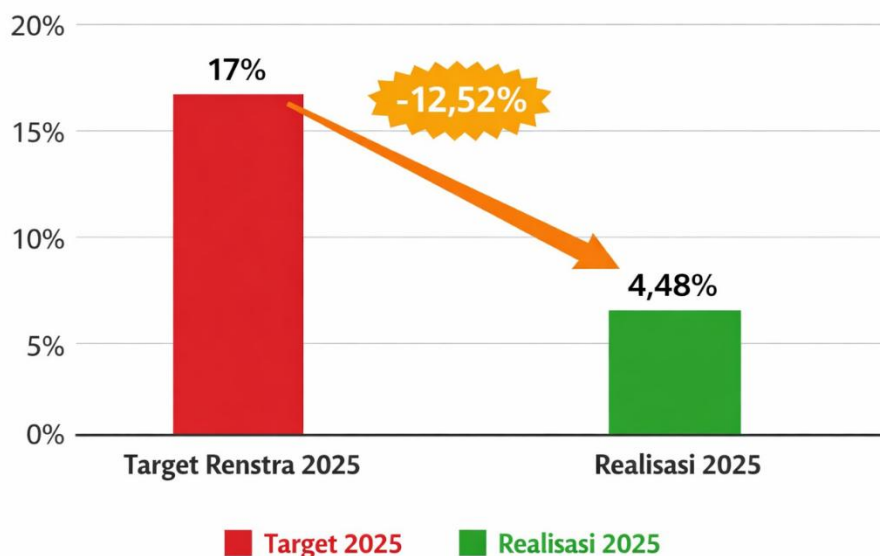
Target prevalensi stunting tahun 2025 ditetapkan sebesar **17%**, sesuai dengan target kinerja dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2021–2026.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data pemantauan status gizi balita Tahun 2025, jumlah balita yang diukur sebanyak **4.111 balita**, dengan jumlah balita stunting sebanyak **184 balita**, sehingga diperoleh prevalensi stunting sebesar **4,48%**.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Prevalensi Stunting	Persentase (%)	17	4,48	379,46

Berdasarkan Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 tercatat sebesar **4,48%**, yang berarti telah berada jauh di bawah target sebesar **17%**. Dengan demikian, capaian indikator Prevalensi Stunting telah **melampaui target yang ditetapkan**.

Perbandingan Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2025 Kabupaten Yahukimo



Grafik menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting dari tahun ke tahun, dengan garis yang menurun tajam hingga mencapai **4,48% pada tahun 2025**. Pola ini memperlihatkan bahwa intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo berjalan efektif dan konsisten. Penurunan yang stabil setiap tahun menandakan peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta keberhasilan edukasi gizi di masyarakat.

Penurunan prevalensi stunting tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo berjalan secara efektif. Intervensi tersebut meliputi pelayanan pemantauan pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu dan puskesmas.

Selain itu, peningkatan cakupan pengukuran balita yang mencapai **4.111 balita** juga menunjukkan peningkatan kualitas sistem pelaporan dan pemantauan status gizi masyarakat.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi indikator **Prevalensi Stunting** dengan tahun sebelumnya dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian program penurunan stunting di Kabupaten Yahukimo dari tahun ke tahun.

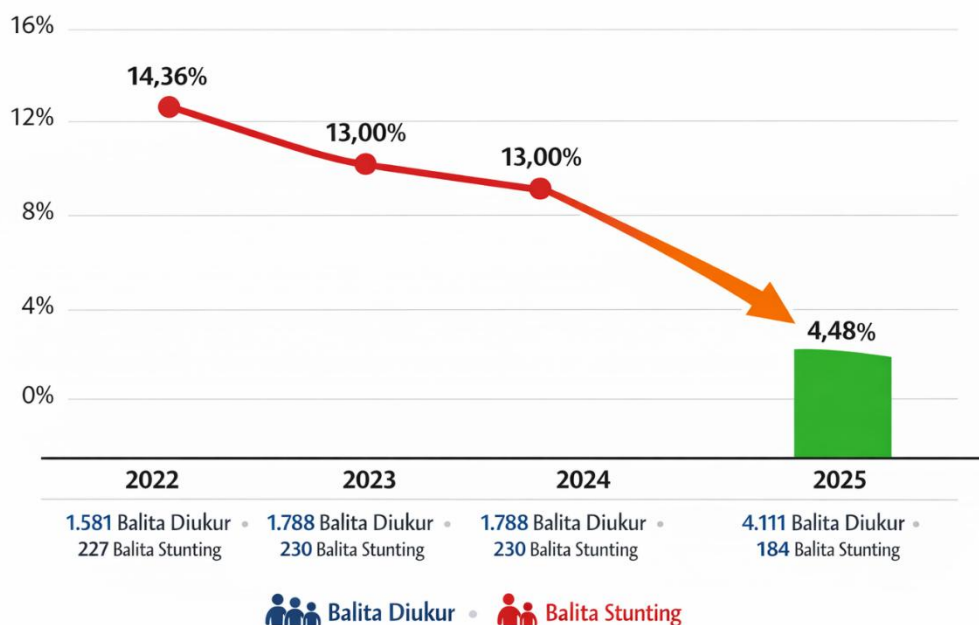
Adapun perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Yahukimo dalam beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Yahukimo Tahun 2022–2025

Tahun	Jumlah Balita Diukur	Jumlah Balita Stunting	Prevalensi (%)
2022	1.581	227	14,36
2023	1.788	230	13,00
2024	1.788	230	13,00
2025	4.111	184	4,48

Berdasarkan tabel tersebut, prevalensi stunting di Kabupaten Yahukimo menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 prevalensi stunting tercatat sebesar **14,36%**, kemudian mengalami penurunan menjadi **13,00% pada tahun 2023**, dan tetap pada angka **13,00% pada tahun 2024**.

Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Yahukimo Tahun 2022–2025



Pada tahun **2025**, prevalensi stunting mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi **4,48%**, yang menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan program penurunan stunting di Kabupaten Yahukimo.

Penurunan prevalensi stunting pada tahun 2025 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- peningkatan cakupan pemantauan status gizi balita;
- pelaksanaan intervensi gizi secara lebih terintegrasi;
- peningkatan peran kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan balita;
- serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi balita.

Selain itu, peningkatan jumlah balita yang diukur dari **1.788 balita pada tahun 2024** menjadi **4.111 balita pada tahun 2025** menunjukkan adanya peningkatan cakupan layanan pemantauan pertumbuhan balita di Kabupaten Yahukimo.

Secara umum, tren penurunan prevalensi stunting menunjukkan bahwa pelaksanaan program penurunan stunting di Kabupaten Yahukimo telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan status gizi balita.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian indikator Prevalensi Stunting mendekati target jangka menengah yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.

Target akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo tahun 2021–2026 untuk indikator **Prevalensi Stunting** ditetapkan sebesar **10,5% pada tahun 2026**. Sementara itu, berdasarkan hasil pengukuran status gizi balita tahun 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Yahukimo tercatat sebesar **4,48%**.

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Selisih	Keterangan
Prevalensi Stunting	10,5%	4,48%	-6,02%	Target akhir Renstra telah terlampaui

Berdasarkan Berdasarkan tabel tersebut, capaian prevalensi stunting pada tahun 2025 telah **melampaui target akhir Renstra tahun 2026**. Realisasi sebesar **4,48%** menunjukkan bahwa tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Yahukimo berada jauh

di bawah target yang telah ditetapkan, dengan selisih sebesar **6,02 persen poin lebih rendah dari target akhir Renstra**.



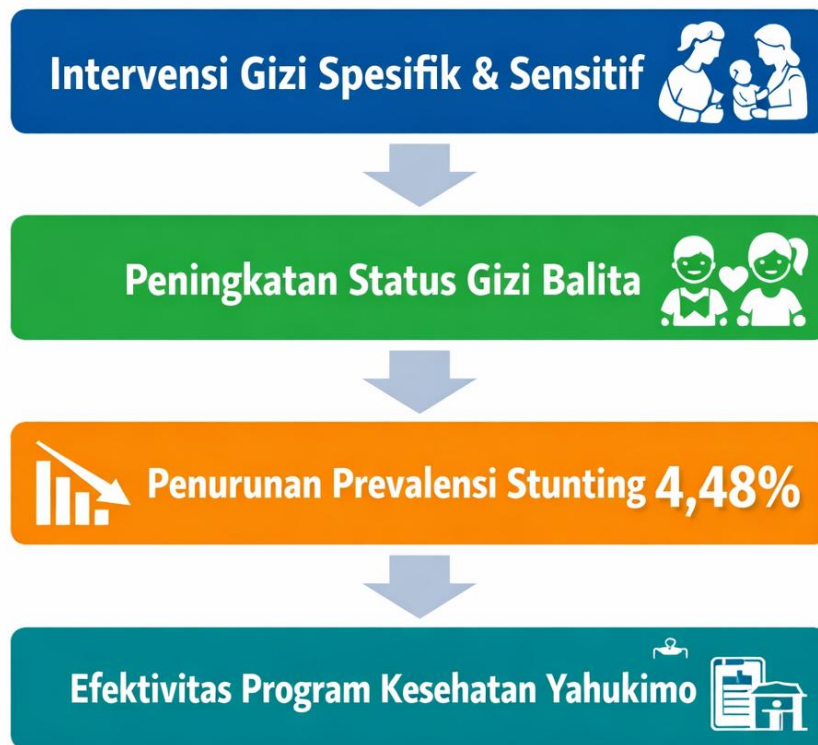
Keberhasilan pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan intervensi penurunan stunting, baik melalui intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif. Program yang berkontribusi terhadap penurunan stunting antara lain pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan (PMT), edukasi pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI, serta penguatan kegiatan posyandu di tingkat kampung.

Meskipun capaian telah melampaui target Renstra, upaya penurunan stunting tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan, mengingat masih terdapat balita yang mengalami stunting di beberapa wilayah distrik yang memerlukan intervensi lebih intensif.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator Prevalensi Stunting di Kabupaten Yahukimo tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran status gizi balita, prevalensi stunting tahun 2025 tercatat sebesar 4,48%, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 17%, sehingga capaian indikator ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.

Diagram alur keberhasilan program penurunan stunting Kabupaten Yahukimo



2. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Yahukimo dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

- **Pelaksanaan Intervensi Gizi Melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT)**

Penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Yahukimo didukung oleh pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal kepada balita gizi kurang dan ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK). Kegiatan ini dilaksanakan melalui **Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**, yang meliputi penyediaan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang serta ibu hamil KEK, persiapan dan distribusi makanan tambahan di tingkat kabupaten dan puskesmas, pemantauan tumbuh kembang balita melalui kunjungan lapangan, supervisi layanan kesehatan ibu dan anak serta program gizi, serta pelaksanaan berbagai kegiatan pencegahan dan penurunan stunting. Pelaksanaan kegiatan tersebut memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan status gizi balita serta menurunkan jumlah balita dengan status gizi kurang di Kabupaten

Yahukimo. Penyediaan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang.

▪ **Pelaksanaan Pendampingan dan Rujukan Kasus Balita Stunting**

Keberhasilan penurunan prevalensi stunting juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan pendampingan dan rujukan kasus balita stunting serta gizi buruk di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui **Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita**, yang meliputi pendampingan rujukan balita stunting dan gizi buruk, pelayanan kesehatan balita sesuai standar, serta penanganan kasus balita yang memiliki risiko stunting. Pelayanan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat puskesmas di wilayah Kabupaten Yahukimo, sehingga mendukung peningkatan cakupan pelayanan kesehatan balita dan mempercepat penanganan kasus stunting secara tepat dan terkoordinasi. Pelaksanaan kegiatan secara merata di berbagai wilayah turut berkontribusi dalam meningkatkan akses layanan kesehatan balita serta mendukung upaya penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan.

▪ **Peningkatan Cakupan Pemantauan Status Gizi Balita**

Keberhasilan penurunan stunting juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah balita yang diukur status gizinya melalui kegiatan posyandu dan puskesmas.

Berdasarkan data tahun 2025:

- Jumlah balita stunting: **184 balita**
- Jumlah balita yang diukur: **4.111 balita**
- Prevalensi stunting: **4,48%**

Peningkatan cakupan pengukuran memberikan data yang lebih akurat serta mendukung pelaksanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.

3. Kendala yang Masih Dihadapi

Meskipun prevalensi stunting di Kabupaten Yahukimo telah menurun secara signifikan, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program penurunan stunting. Salah satu kendala utama adalah kondisi geografis wilayah Kabupaten Yahukimo yang luas dan sebagian besar sulit dijangkau, sehingga pelaksanaan pemantauan balita di beberapa distrik masih terbatas. Selain itu, distribusi makanan tambahan berbasis pangan lokal membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar, serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di beberapa wilayah masih belum merata.

Selain faktor geografis, keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi juga menjadi kendala dalam upaya penurunan stunting. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara optimal pentingnya pemberian ASI eksklusif, pemenuhan gizi seimbang, serta pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan anak. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan munculnya kasus stunting baru apabila tidak dilakukan upaya edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan.

4. Alternatif Solusi yg Telah Dilakukan

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan beberapa upaya perbaikan secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain meningkatkan frekuensi pemantauan tumbuh kembang balita melalui kegiatan posyandu, melaksanakan kunjungan lapangan ke wilayah distrik yang sulit dijangkau, serta melakukan supervisi layanan kesehatan ibu dan anak serta program gizi secara berkala. Selain itu, koordinasi antara tenaga kesehatan dan kader posyandu terus diperkuat guna meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan balita.

Di samping itu, kegiatan edukasi gizi kepada ibu balita dan ibu hamil juga terus ditingkatkan melalui penyuluhan kesehatan dan pendampingan keluarga. Upaya lain yang dilakukan adalah memperkuat pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi berbasis keluarga, sehingga diharapkan upaya penurunan stunting dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

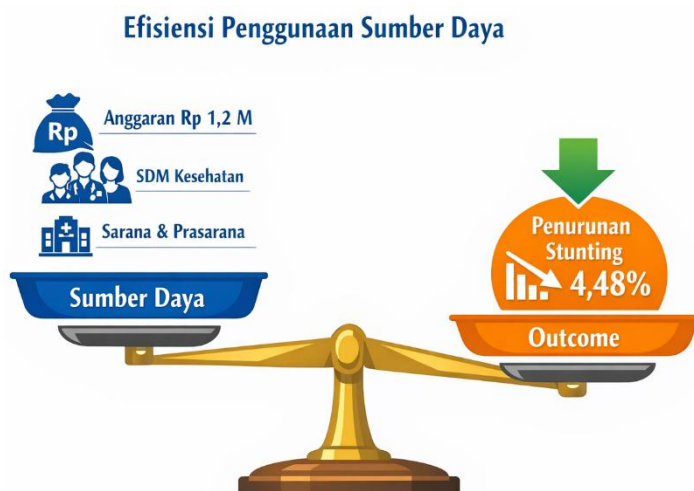
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara capaian kinerja indikator **Prevalensi Stunting** dengan pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Yahukimo. Indikator prevalensi stunting merupakan indikator outcome yang menggambarkan keberhasilan intervensi gizi dalam menurunkan jumlah balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis.

a. Perbandingan Kinerja dan Anggaran

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi
Prevalensi Stunting	17%	4,48%	Tercapai	Rp17.785.341.000	Rp1.200.000.000	Efisien (Outcome tercapai)

Rincian Anggaran Pendukung Indikator Prevalensi Stunting

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	Rp16.508.541.000	Rp1.200.000.000	Penyediaan PMT balita dan ibu hamil KEK, pemantauan gizi, supervisi layanan KIA dan gizi
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp1.276.800.000	Rp0	Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk dan pelayanan kesehatan balita
	Total	Rp17.785.341.000	Rp1.200.000.000	



b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- **Efisiensi Anggaran**

Pelaksanaan program penurunan stunting di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas serta Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan. Anggaran tersebut dialokasikan melalui sub kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan balita.

Sub kegiatan **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat** digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), pemantauan tumbuh kembang balita, supervisi layanan kesehatan ibu dan anak, serta pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting. Selain itu, sub kegiatan **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita** digunakan untuk mendukung kegiatan pendampingan rujukan balita stunting dan gizi buruk serta pelayanan kesehatan balita di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan dukungan anggaran sebesar **Rp17.785.341.000**, prevalensi stunting berhasil diturunkan hingga **4,48%**, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar **17%**. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran telah memberikan dampak positif terhadap pencapaian indikator kinerja, sehingga secara umum penggunaan anggaran dapat dikategorikan **cukup efisien** dari sisi pencapaian outcome.

Namun demikian, tingkat realisasi anggaran yang relatif rendah menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar pemanfaatan anggaran dapat lebih maksimal dalam mendukung intervensi penurunan stunting.

- **Efisiensi Sumber Daya Manusia**

Pelaksanaan kegiatan penurunan stunting didukung oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas serta kader kesehatan di tingkat kampung. Tenaga kesehatan berperan dalam pemantauan pertumbuhan balita, pelaksanaan kegiatan posyandu, pemberian edukasi gizi kepada ibu balita, serta penanganan kasus balita dengan status gizi kurang.

Keterlibatan kader kesehatan di tingkat kampung turut mendukung peningkatan cakupan pelayanan kesehatan balita, terutama dalam kegiatan penimbangan balita, pemberian makanan tambahan, serta pelaksanaan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

- **Efisiensi Proses Pelayanan**

Pelayanan kesehatan gizi dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan posyandu, puskesmas, serta kunjungan lapangan ke wilayah distrik. Proses pelayanan meliputi penimbangan balita secara berkala, pemantauan tumbuh

kembang balita, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi keluarga, serta rujukan balita dengan kondisi gizi kurang atau gizi buruk.

Pelaksanaan pelayanan secara berjenjang dan terintegrasi mendukung efektivitas intervensi penurunan stunting serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Yahukimo.

c. Kesimpulan Efisiensi

Secara umum, penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian indikator **Prevalensi Stunting** di Kabupaten Yahukimo tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan capaian prevalensi stunting yang lebih rendah dari target yang telah ditetapkan, meskipun realisasi anggaran masih relatif rendah dibandingkan dengan anggaran yang tersedia.

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelayanan gizi dan pelayanan kesehatan balita telah memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah balita stunting. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan optimalisasi pemanfaatan anggaran serta penguatan pelaksanaan kegiatan di lapangan agar efektivitas program penurunan stunting dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

6. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Prevalensi Stunting di Kabupaten Yahukimo tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa program dan sub kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan status gizi balita dan pencegahan stunting. Program utama yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, khususnya melalui kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas.

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang memiliki beberapa sub kegiatan yang secara langsung mendukung pelaksanaan intervensi penurunan stunting. Sub kegiatan tersebut berfokus pada pelayanan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan balita sebagai kelompok sasaran utama dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Indikator Prevalensi Stunting

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	Rp16.508.541.000
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp1.276.800.000
Total Anggaran Pendukung				Rp17.785.341.000

Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Penurunan Stunting Kabupaten Yahukimo Tahun 2025



Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat merupakan sub kegiatan utama yang mendukung pencapaian indikator prevalensi stunting melalui penyediaan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang dan ibu hamil KEK, pemantauan tumbuh kembang balita, supervisi layanan kesehatan ibu dan anak serta program gizi, serta pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Yahukimo. Kegiatan ini berperan penting dalam meningkatkan status gizi balita serta mencegah terjadinya kasus stunting baru.

Selain itu, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator prevalensi stunting melalui kegiatan pendampingan rujukan balita stunting dan gizi buruk, pelayanan kesehatan balita sesuai standar, serta penanganan kasus balita yang berisiko mengalami stunting. Pelaksanaan kegiatan ini mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan balita serta mempercepat penanganan kasus gizi bermasalah.

Secara umum, keberhasilan pencapaian indikator Prevalensi Stunting di Kabupaten Yahukimo tahun 2025 didukung oleh keterpaduan pelaksanaan program pelayanan kesehatan gizi dan pelayanan kesehatan balita yang dilaksanakan secara berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sinergi pelaksanaan kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah balita stunting serta peningkatan status gizi masyarakat secara keseluruhan.

SASARAN STRATEGIS 2

**Menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk
serta meningkatnya mutu fasilitas kesehatan**

E. Indikator Kinerja Utama : Persentase Akreditasi RS Pemerintah

Persentase Akreditasi Rumah Sakit (RS) Pemerintah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan milik pemerintah. Akreditasi rumah sakit adalah bentuk pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan kepada rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta tata kelola manajemen rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

Akreditasi rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, meningkatkan keselamatan pasien, memberikan perlindungan bagi pasien dan tenaga kesehatan, serta mendukung program pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya akreditasi rumah sakit, diharapkan pelayanan kesehatan rujukan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, aman, dan berkualitas.

Rumah sakit pemerintah yang ada di Kabupaten Yahukimo berjumlah **1 unit**, yaitu **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai tipe D**. Rumah sakit tersebut telah memperoleh status **Terakreditasi D**, sehingga menunjukkan bahwa pelayanan

kesehatan yang diberikan telah memenuhi standar dasar akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran indikator Persentase Akreditasi RS Pemerintah dilakukan dengan membandingkan jumlah rumah sakit pemerintah yang telah terakreditasi dengan jumlah seluruh rumah sakit pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Yahukimo, kemudian dikalikan 100 persen.

Formula perhitungan Indikator ini adalah:

$$\text{Persentase Akreditasi RS Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah RS Pemerintah}}{\text{Jumlah Seluruh RS Pemerintah}} \times 100\%$$

Target Persentase Akreditasi RS Pemerintah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%**, yang berarti seluruh rumah sakit pemerintah di Kabupaten Yahukimo diharapkan telah memiliki status akreditasi sesuai standar yang ditetapkan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Persentase Akreditasi RS Pemerintah digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar mutu pelayanan rumah sakit pemerintah di Kabupaten Yahukimo. Rumah sakit pemerintah yang tersedia di Kabupaten Yahukimo berjumlah **1 unit**, yaitu **RSUD Dekai** sebagai rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat.

Pada tahun 2025, RSUD Dekai masih mempertahankan status **Terakreditasi D**, sehingga target Persentase Akreditasi RS Pemerintah sebesar **100%** dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pemerintah telah memenuhi standar mutu pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja Utama			Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Persentase Pemerintah	Akreditasi	RS	Persentase (%)	100%	100%	100%

Persentase Akreditasi RS Pemerintah Tahun 2025



2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

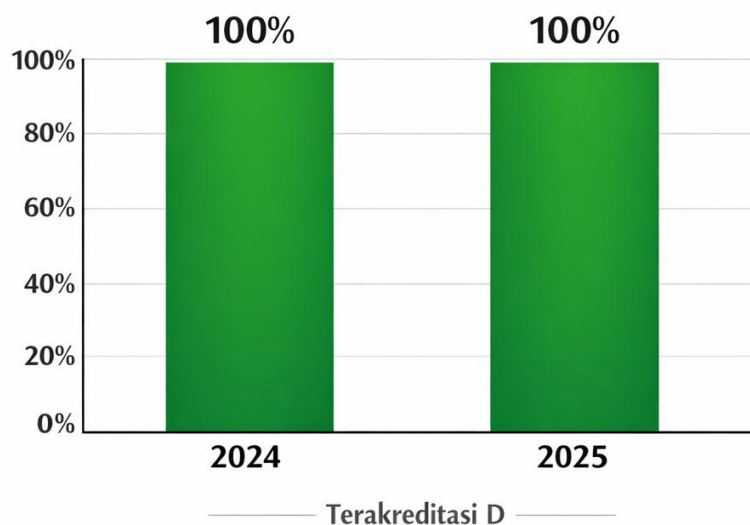
Perbandingan realisasi indikator **Persentase Akreditasi RS Pemerintah** dilakukan untuk mengetahui perkembangan status akreditasi rumah sakit pemerintah dari tahun ke tahun serta untuk menilai konsistensi pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Yahukimo.

Rumah sakit pemerintah yang terdapat di Kabupaten Yahukimo berjumlah **1 unit**, yaitu **RSUD Dekai tipe D**, yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang tersedia, RSUD Dekai telah memperoleh status **Terakreditasi D** pada tahun 2024 dan status tersebut masih dipertahankan pada tahun 2025.

Perkembangan Status Akreditasi RS Pemerintah Tahun 2024–2025

Tahun	Jumlah RS Pemerintah	RS Terakreditasi	Persentase (%)	Status Akreditasi
2024	1	1	100%	Terakreditasi D
2025	1	1	100%	Terakreditasi D

Status Akreditasi RS Pemerintah Tahun 2024–2025



Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Persentase Akreditasi RS Pemerintah di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan capaian yang stabil sebesar **100%**. Status akreditasi RSUD Dekai sebagai satu-satunya rumah sakit pemerintah di Kabupaten Yahukimo tetap berada pada kategori **Terakreditasi D**, sehingga menunjukkan bahwa standar mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan rujukan tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku.

Stabilnya capaian akreditasi rumah sakit ini menunjukkan adanya komitmen dalam mempertahankan mutu pelayanan kesehatan serta pelaksanaan standar pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan. Selain itu, keberlanjutan status akreditasi menunjukkan bahwa sistem manajemen rumah sakit serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian indikator **Persentase Akreditasi RS Pemerintah** mendukung pencapaian target jangka menengah yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.

Target akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo tahun 2021–2026 untuk indikator **Persentase Akreditasi RS Pemerintah** ditetapkan sebesar **100%**, yang

berarti seluruh rumah sakit pemerintah di Kabupaten Yahukimo diharapkan telah memiliki status akreditasi sesuai standar yang berlaku.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025, Persentase Akreditasi RS Pemerintah di Kabupaten Yahukimo tercatat sebesar **100%**, yang menunjukkan bahwa rumah sakit pemerintah yang ada telah memenuhi standar akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2025	Selisih	Keterangan
Persentase Akreditasi RS Pemerintah	100%	100%	0%	Target tercapai

Berdasarkan tabel tersebut, capaian Persentase Akreditasi RS Pemerintah pada tahun 2025 telah sesuai dengan target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rumah sakit pemerintah di Kabupaten Yahukimo telah memenuhi standar akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian target ini menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pemerintah telah dilaksanakan dengan baik serta didukung oleh penerapan standar pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan nasional. Selain itu, keberlanjutan status akreditasi rumah sakit menunjukkan adanya komitmen dalam mempertahankan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan keselamatan pasien secara berkelanjutan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator **Persentase Akreditasi RS Pemerintah** di Kabupaten Yahukimo tahun 2025. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, Persentase Akreditasi RS Pemerintah pada tahun 2025 tercatat sebesar **100%**, sehingga target yang ditetapkan telah tercapai. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit pemerintah di Kabupaten Yahukimo telah mampu mempertahankan standar pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

- a. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan mempertahankan status akreditasi rumah sakit pemerintah di Kabupaten Yahukimo dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

▪ **Penerapan Standar Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit**

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Akreditasi RS Pemerintah didukung oleh penerapan standar pelayanan kesehatan di rumah sakit secara berkelanjutan. RSUD Dekai sebagai satu-satunya rumah sakit pemerintah telah melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan dalam sistem akreditasi rumah sakit, termasuk penerapan standar keselamatan pasien, pengelolaan pelayanan kesehatan, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan.

Penerapan standar pelayanan tersebut mendukung keberlangsungan status akreditasi rumah sakit serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

▪ **Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan**

Keberhasilan pencapaian indikator ini juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan yang terencana dan terkoordinasi dengan baik. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, yang bertujuan untuk mendukung kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan rujukan sesuai standar yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan rujukan mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis yang menjadi bagian dari standar akreditasi rumah sakit.

b. Kendala yang Masih Dihadapi

Meskipun capaian indikator Persentase Akreditasi RS Pemerintah telah mencapai target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memerlukan pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan agar tetap memenuhi standar akreditasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi khusus di bidang pelayanan rumah sakit juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan standar pelayanan kesehatan.

Selain itu, kondisi geografis wilayah Kabupaten Yahukimo yang luas dan sulit dijangkau juga mempengaruhi kelancaran sistem pelayanan rujukan, terutama dalam hal mobilisasi pasien dari wilayah terpencil menuju rumah sakit rujukan.

c. Alternatif Solusi yg Telah Dilakukan

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mempertahankan status akreditasi rumah sakit pemerintah, beberapa upaya telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit.

Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit secara berkala, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pembinaan teknis, serta memperkuat pelaksanaan sistem pelayanan rujukan agar dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi. Selain itu, dilakukan koordinasi secara rutin antara Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit dalam rangka memastikan pemenuhan standar pelayanan kesehatan sesuai ketentuan akreditasi.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan status akreditasi rumah sakit pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara capaian kinerja indikator **Persentase Akreditasi RS Pemerintah** dengan pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Yahukimo. Indikator Persentase Akreditasi RS Pemerintah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan milik pemerintah.

a. Perbandingan Kinerja dan Anggaran

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi
Persentase Akreditasi RS Pemerintah	100%	100%	Tercapai	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Efisien

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- **Efisiensi Anggaran**

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Akreditasi RS Pemerintah pada tahun 2025 didukung melalui **Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan** dengan anggaran sebesar **Rp500.000.000**. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kesiapan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan serta pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.

Pemanfaatan anggaran pada sub kegiatan tersebut mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit serta membantu pemenuhan standar pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari penilaian akreditasi rumah sakit. Dengan capaian indikator sebesar **100%**, penggunaan anggaran dapat dikategorikan **efisien**, karena target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan

- **Efisiensi Sumber Daya Manusia**

Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan didukung oleh tenaga kesehatan serta tenaga administrasi yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit. Keterlibatan tenaga kesehatan dalam penerapan standar pelayanan kesehatan serta pengelolaan sistem pelayanan rujukan mendukung keberhasilan dalam mempertahankan status akreditasi rumah sakit.

Selain itu, koordinasi antara tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit menjadi faktor penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan serta memastikan pelaksanaan standar pelayanan berjalan secara konsisten.

- **Efisiensi Proses Pelayanan**

Proses pelayanan kesehatan rujukan dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem pelayanan rumah sakit yang terstruktur. Pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem akreditasi rumah sakit, sehingga mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta keselamatan pasien.

Pelaksanaan proses pelayanan yang terstandar mendukung keberhasilan dalam mempertahankan status akreditasi rumah sakit serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

c. Kesimpulan Efisiensi

Secara umum, penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian indikator **Persentase Akreditasi RS Pemerintah** di Kabupaten Yahukimo tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini ditandai dengan tercapainya target akreditasi rumah sakit sebesar **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh rumah sakit pemerintah telah memenuhi standar mutu pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan telah berjalan secara efektif dalam mendukung pemenuhan standar akreditasi rumah sakit secara berkelanjutan.

6. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator Persentase Akreditasi RS Pemerintah pada tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Yahukimo. Program tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dapat berjalan sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

Salah satu program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Program tersebut dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan anggaran sebesar Rp500.000.000. Sub kegiatan ini mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan serta pemenuhan standar teknis dan administrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan mendukung kesiapan rumah sakit dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan yang menjadi bagian

dari penilaian akreditasi rumah sakit. Selain itu, kegiatan ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas sistem rujukan pasien serta memperkuat koordinasi antara fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit rujukan.

Dengan adanya dukungan program dan kegiatan tersebut, rumah sakit pemerintah di Kabupaten Yahukimo dapat mempertahankan status akreditasi yang telah diperoleh serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

SASARAN STRATEGIS 2

**Menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk
serta meningkatnya mutu fasilitas kesehatan**

F. Indikator Kinerja Utama : Persentase Akreditasi Puskesmas

Persentase Akreditasi Puskesmas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas. Akreditasi puskesmas merupakan bentuk pengakuan terhadap puskesmas yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan, manajemen pelayanan, serta keselamatan pasien sesuai ketentuan yang berlaku.

Akreditasi puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar secara berkelanjutan, meningkatkan keselamatan pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan adanya akreditasi puskesmas, diharapkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dapat dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, jumlah puskesmas di Kabupaten Yahukimo sebanyak **33 unit**, dan seluruh puskesmas tersebut telah memiliki status akreditasi. Meskipun pada tahun 2025 tidak dilaksanakan proses akreditasi baru, status akreditasi puskesmas tetap dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Persentase Akreditasi Puskesmas digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Yahukimo.

Pada tahun 2025, jumlah puskesmas di Kabupaten Yahukimo sebanyak **33 unit**, dan seluruh puskesmas telah memiliki status akreditasi. Dengan demikian, realisasi indikator Persentase Akreditasi Puskesmas pada tahun 2025 mencapai **100%**, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **78,79%**

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Persentase Puskesmas	Akreditasi	Persentase (%)	78,79%	100%	126,94%

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa realisasi Persentase Akreditasi Puskesmas pada tahun 2025 mencapai 100%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 78,79%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh puskesmas di Kabupaten Yahukimo telah memenuhi standar akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun pada tahun 2025 tidak dilakukan proses akreditasi baru, status akreditasi yang telah diperoleh sebelumnya tetap dipertahankan melalui pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan dasar serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian indikator Persentase Akreditasi Puskesmas dilakukan untuk melihat perkembangan mutu pelayanan kesehatan dasar dari tahun sebelumnya hingga tahun berjalan. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah puskesmas di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 dan 2025 sebanyak **33 unit**, dan seluruh puskesmas tersebut telah memiliki status akreditasi. pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Yahukimo.

Dengan demikian, capaian Persentase Akreditasi Puskesmas pada tahun 2024 maupun tahun 2025 tercatat sebesar **100%**, sehingga menunjukkan bahwa mutu

pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tetap terjaga secara konsisten.

Perkembangan Tahun 2024–2025

Tahun	Jumlah Puskesmas	Puskesmas Terakreditasi	Persentase (%)
2024	33	33	100%
2025	33	33	100%

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa capaian Persentase Akreditasi Puskesmas pada tahun 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu tetap sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh puskesmas di Kabupaten Yahukimo telah mempertahankan status akreditasi yang dimiliki.

Stabilnya capaian indikator ini disebabkan oleh tidak adanya pelaksanaan akreditasi baru pada tahun 2025, mengingat seluruh puskesmas yang ada telah terakreditasi pada tahun sebelumnya. Selain itu, akreditasi puskesmas memiliki siklus waktu tertentu sehingga tidak dilakukan setiap tahun, melainkan dilakukan secara berkala sesuai jadwal penilaian ulang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Yahukimo telah terjaga dengan baik melalui penerapan standar pelayanan kesehatan yang konsisten di seluruh puskesmas.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir Renstra dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian indikator **Persentase Akreditasi Puskesmas** dalam mendukung target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2021–2026.

Dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, target akhir indikator **Persentase Akreditasi Puskesmas** ditetapkan sebesar **78,79%**. Target tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar puskesmas di Kabupaten Yahukimo diharapkan telah memiliki status akreditasi sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

Berdasarkan data capaian tahun 2025, jumlah puskesmas di Kabupaten Yahukimo sebanyak **33 unit**, dan seluruh puskesmas tersebut telah memiliki status akreditasi. Dengan demikian, realisasi indikator Persentase Akreditasi Puskesmas pada tahun 2025 mencapai **100%**, sehingga telah **melampaui target akhir Renstra** yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2025	Capaian%
Persentase Akreditasi Puskesmas	78,79%	100%	126,94%

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Akreditasi Puskesmas pada tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar **78,79%**. Capaian sebesar **100%** menunjukkan bahwa seluruh puskesmas di Kabupaten Yahukimo telah memenuhi standar akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Yahukimo telah dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, pencapaian ini juga mencerminkan komitmen dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Meskipun capaian telah mencapai 100%, upaya pemeliharaan mutu pelayanan kesehatan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar status akreditasi puskesmas dapat dipertahankan pada masa yang akan datang.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator **Persentase Akreditasi Puskesmas** di Kabupaten Yahukimo tahun 2025. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, Persentase Akreditasi Puskesmas pada tahun 2025 tercatat sebesar **100%**, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai bahkan melampaui target akhir Renstra.

a. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Akreditasi Puskesmas dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

▪ **Penerapan Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas**

Keberhasilan mempertahankan status akreditasi puskesmas didukung oleh penerapan standar pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas secara konsisten. Puskesmas di Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan dalam sistem akreditasi, termasuk penerapan standar keselamatan pasien, manajemen pelayanan kesehatan, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

Penerapan standar pelayanan tersebut mendukung keberlangsungan status akreditasi puskesmas serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

▪ **Dukungan Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan**

Keberhasilan pencapaian indikator ini juga didukung oleh pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan di puskesmas secara berkala. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh puskesmas tetap melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Melalui pembinaan dan pengawasan secara rutin, berbagai aspek pelayanan kesehatan dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan sehingga mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dapat terjaga.

b. **Kendala yang Masih Dihadapi**

Meskipun Meskipun seluruh puskesmas di Kabupaten Yahukimo telah memiliki status akreditasi, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam mempertahankan mutu pelayanan kesehatan.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di beberapa puskesmas yang memerlukan pemeliharaan secara berkala agar tetap memenuhi standar akreditasi. Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan pada beberapa wilayah terpencil juga menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku.

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Yahukimo yang luas dan sulit dijangkau juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan di beberapa wilayah, terutama dalam hal distribusi logistik kesehatan serta pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan secara langsung.

c. Alternatif Solusi yg Telah Dilakukan

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mempertahankan status akreditasi puskesmas, beberapa upaya telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.

Upaya yang dilakukan antara lain melaksanakan pembinaan dan supervisi pelayanan kesehatan secara berkala, meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, serta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan puskesmas dalam rangka memastikan pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan status akreditasi seluruh puskesmas serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara capaian indikator **Persentase Akreditasi Puskesmas** dengan pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Yahukimo.

Indikator Persentase Akreditasi Puskesmas merupakan indikator mutu pelayanan kesehatan dasar yang menggambarkan tingkat pemenuhan standar pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pada tahun 2025, seluruh puskesmas di Kabupaten Yahukimo telah memiliki status akreditasi, sehingga upaya yang dilakukan lebih difokuskan pada pemeliharaan mutu pelayanan kesehatan agar standar akreditasi tetap terpenuhi.

a. Perbandingan Kinerja dan Anggaran

Karena tidak ada kegiatan akreditasi baru pada tahun 2025, dukungan anggaran lebih difokuskan pada kegiatan pelayanan kesehatan dasar serta pembinaan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi
Persentase Akreditasi Puskesmas	78,79%	100%	Tercapai	Mendukung melalui kegiatan pelayanan kesehatan dasar	Menyesuaikan realisasi kegiatan	Efisien

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- **Efisiensi Anggaran**

Pada tahun 2025, tidak dilaksanakan kegiatan akreditasi puskesmas baru karena seluruh puskesmas di Kabupaten Yahukimo telah memiliki status akreditasi pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan pelayanan kesehatan dasar serta pembinaan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas.

Anggaran yang digunakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan mendukung pemeliharaan standar pelayanan kesehatan yang telah dicapai sebelumnya. Dengan capaian indikator sebesar **100%**, penggunaan anggaran dapat dikategorikan **efisien**, karena target dapat dipertahankan tanpa memerlukan pelaksanaan akreditasi baru.

- **Efisiensi Sumber Daya Manusia**

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas didukung oleh tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan sesuai standar operasional prosedur. Tenaga kesehatan berperan dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan serta memastikan pelaksanaan pelayanan sesuai standar akreditasi.

Selain itu, pelaksanaan pembinaan dan supervisi oleh Dinas Kesehatan juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas.

- **Efisiensi Proses Pelayanan**

Proses pelayanan kesehatan di puskesmas dilaksanakan sesuai standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dalam sistem akreditasi. Pelaksanaan pelayanan kesehatan secara terstruktur dan berkelanjutan mendukung pemeliharaan mutu pelayanan kesehatan serta menjaga keberlangsungan status akreditasi puskesmas.

Pelaksanaan proses pelayanan yang terstandar mendukung tercapainya target indikator tanpa memerlukan pelaksanaan akreditasi ulang pada tahun berjalan.

c. Kesimpulan Efisiensi

Secara umum, penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian indikator **Persentase Akreditasi Puskesmas** di Kabupaten Yahukimo tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan

tercapainya capaian indikator sebesar **100%**, yang melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **78,79%**.

Meskipun tidak dilakukan kegiatan akreditasi baru pada tahun 2025, mutu pelayanan kesehatan tetap terjaga melalui pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara efektif dalam mempertahankan mutu pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas.

6. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator Persentase Akreditasi Puskesmas pada tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar serta pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Yahukimo.

Program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Program tersebut dilaksanakan melalui berbagai sub kegiatan yang berfokus pada pemeliharaan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, antara lain:

- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar**, yang bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
- **Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan.
- **Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas**, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta menjaga keberlanjutan status akreditasi puskesmas.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berperan penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas, sehingga status akreditasi yang telah diperoleh dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Meskipun pada tahun 2025 tidak dilaksanakan akreditasi baru, pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tetap memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga standar pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas di Kabupaten Yahukimo.

3.1 Realisais Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, **Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo** memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp180.419.430.959**. Berdasarkan laporan realisasi anggaran hingga **31 Desember 2025**, jumlah anggaran yang terealisasi sebesar **Rp122.270.991.753** atau sekitar **67,77%** dari total anggaran yang tersedia. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sebesar **Rp58.148.439.206**, yang menunjukkan bahwa sebagian kegiatan belum terlaksana secara optimal.

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen **Perjanjian Kinerja (PK)** dan **Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program pelayanan kesehatan, peningkatan mutu fasilitas kesehatan, serta penguatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Realisasi
Belanja Pegawai	51.147.264.859	49.279.147.253	1.868.117.606	96,35%
Belanja Barang dan Jasa	79.909.621.900	34.114.521.900	45.795.100.000	42,69%
Belanja Hibah	9.000.000.000	7.456.000.000	1.544.000.000	82,84%
Belanja Modal Peralatan	40.362.544.200	8.941.221.600	31.421.322.600	22,15%
Belanja Modal Gedung/Bangunan	38.194.392.200	29.647.162.600	8.547.229.600	77,62%
TOTAL	180.419.430.959	122.270.991.753	58.148.439.206	

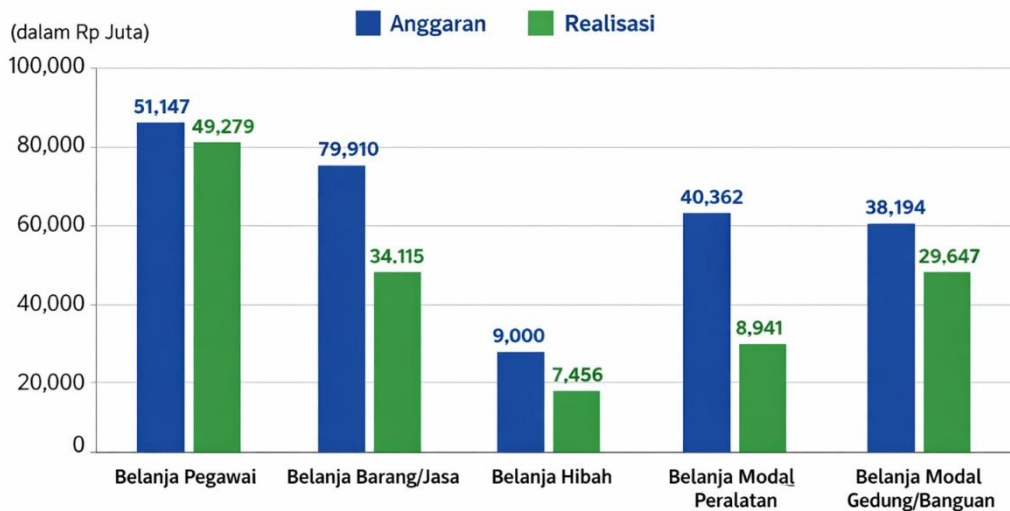
3.1.1 Analisis

Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis sebagai berikut:

- **Belanja Pegawai** menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi yaitu sebesar **96,35%**, yang menunjukkan bahwa pembayaran gaji, tunjangan, serta hak pegawai telah dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu.

- **Belanja Barang dan Jasa** memiliki tingkat realisasi yang relatif rendah yaitu sebesar **42,69%**, yang mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional kesehatan, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan lapangan, keterbatasan distribusi logistik, serta kendala geografis wilayah.
- **Belanja Hibah** memiliki tingkat realisasi yang cukup baik yaitu sebesar **82,84%**, yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap kegiatan kesehatan masyarakat, termasuk kegiatan berbasis masyarakat dan pelayanan kesehatan dasar, telah berjalan dengan baik.
- **Belanja Modal Gedung/Bangunan** menunjukkan realisasi sebesar **77,62%**, yang menandakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana kesehatan telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang belum selesai sepenuhnya.
- **Belanja Modal Peralatan** menunjukkan tingkat realisasi yang sangat rendah yaitu sebesar **22,15%**, yang mengindikasikan adanya keterlambatan dalam pengadaan alat kesehatan dan sarana penunjang pelayanan kesehatan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025



	Anggaran	Realisasi	Sies Anggaran	% Realisasi
Jerta Belanja	150,815,418,053	152,80,051,763	55,718,80,008	89,79%

3.1.2 Kesimpulan

Secara umum, realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 telah mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Namun demikian, efektivitas penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan, terutama pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Peralatan, yang memiliki tingkat realisasi relatif rendah.

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta percepatan proses pengadaan barang dan jasa menjadi faktor penting dalam meningkatkan tingkat realisasi anggaran serta mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan pada masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa indikator kinerja utama yang menunjukkan capaian positif, meskipun masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Capaian indikator **Angka Kematian Ibu (AKI)** menunjukkan bahwa masih terdapat kasus kematian ibu yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, penguatan sistem rujukan, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan menjadi langkah penting dalam menurunkan angka kematian ibu di masa mendatang.

Indikator **Angka Kematian Bayi (AKB)** menunjukkan capaian yang telah memenuhi target tahunan, meskipun masih perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir untuk mencapai target akhir Renstra. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir serta peningkatan pelayanan neonatal menjadi fokus penting dalam menurunkan angka kematian bayi.

Indikator **Angka Kematian Balita (AKABA)** juga menunjukkan capaian yang telah memenuhi target tahunan, namun masih memerlukan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan balita, terutama dalam pemantauan tumbuh kembang serta pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

Indikator **Prevalensi Stunting** menunjukkan hasil yang cukup baik dengan tren penurunan prevalensi stunting dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan, pemantauan status gizi, serta kegiatan pencegahan stunting telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan status gizi balita di Kabupaten Yahukimo.

Indikator **Persentase Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah** telah mencapai target sebesar **100%**, yang menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Yahukimo telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Demikian pula dengan

Persentase Akreditasi Puskesmas, yang menunjukkan bahwa seluruh puskesmas telah terakreditasi, sehingga mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja organisasi serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Ke depan, Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang merata, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Sumohai, 27 Maret 2026

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN



**ASER SOBOLIM, S.K.M
PEMBINA Tk,I**

NIP. 197108091993121001

LAMPIRAN
INDIKATOR
KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Poros Seredala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 440/025/ DINKES/ YHK/ 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE TAHUN 2021-2025

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
20. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 27);

21. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2025;
 - Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumohai,
Pada Tanggal : 3 Februari 2025

PIHAK PERTAMA

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN



ASER SOBOLIM, S.K.M
PEMBINA Tk,I
NIP. 197108091993121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Yahukimo di Sumohai;
- Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
- Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo di Sumohai;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : 440/ 015/ DINKES/ YHK/ 2025
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2021-2025**

Nama Organisasi : Dinas Kesehatan

Tugas, Pokok dan Fungsi : Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan, sebagaimana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesehatan;
- c. penyusunan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi kesehatan;
- d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan / Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	LHE SAKIP Oleh Inspektorat	Sekretariat	Sub Bagian Program
2.	Menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk serta meningkatnya mutu fasilitas kesehatan	Angka Kematian Ibu	$\frac{\Sigma \text{ kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu}}{\Sigma \text{ kelahiran hidup pada periode yang sama}} \times 100.000$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan dan Gizi
		Angka Kematian Bayi	$\frac{\Sigma \text{ kematian bayi (dibawah 1 tahun), selama tahun tertentu}}{\Sigma \text{ kelahiran hidup pada tahun yang sama}} \times 1000$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan dan Gizi
		Angka Kematian Balita	$\frac{\Sigma \text{ kematian penduduk yang meninggal pada usia, kurang dari 5 tahun dalam tahun tertentu}}{\Sigma \text{ kelahiran hidup pada periode yang sama}} \times 1000$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan dan Gizi
		Prevalensi Stunting	$\frac{\Sigma \text{ anak balita pendek \& sangat pendek}}{\Sigma \text{ anak balita}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan dan Gizi
		Persentase Akreditasi RS Pemerintah	$\frac{\Sigma \text{ rumah sakit pemerintah yang terakreditasi}}{\Sigma \text{ rumah sakit di kabupaten}} \times 100\%$	RSUD Dekai	Program RSUD
		Persentase Akreditasi Puskesmas	$\frac{\Sigma \text{ puskesmas yang terakreditasi}}{\Sigma \text{ puskesmas di kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Kesehatan	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3.	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Kabupaten Yahukimo	Dinas Kesehatan	Bidang pada Dinas Kesehatan

Sumohai, 03 Februari 2025

PIHAK PERTAMA

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN



ASER SOBOLIM, S.K.M

PEMBINA Tk,I

NIP. 197108091993121001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Poros Seredala

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASER SOBOLIM, S.K.M**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DIDIMUS YAHULI, SH**

Jabatan : **BUPATI YAHUKIMO**

selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumohai, 14 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI YAHUKIMO



DIDIMUS YAHULI, SH., MH



PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN



ASER SOBOLIM, S.K.M
PEMBINA Tk,I
NIP. 197108091993121001



PERJANJIAN KERJA
PERUBAHAN TAHUN 2025 KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN YAHUKIMO

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	61(B)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 51.947.264.859
2	Menurunnya angka dan kesakitan penduduk kematian serta meningkatnya mutu kesehatan	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	139,6	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Rp 4.385.400.000
		Angka Kematian Bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	14,0	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 1.000.000.000
		Angka Kematian Balita	Per 1000 Kelahiran Hidup	26,2	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.276.800.000

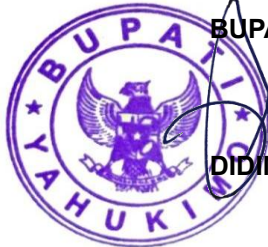
		Prevalensi Stunting	Persentase (%)	17	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 16.508.541.000
		Persentase Akreditasi RS Pemerintah	Persentase (%)	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp 500.000.000
		Persentase Akreditasi Puskesmas	Persentase (%)	78,79	-	-
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya						
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,80	-	-
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis						Rp75.617.005.859

Jumlah Anggaran Untuk Keseluruhan Program Baik Program Utama dan Program Pendukung (Rutin)
Adalah : **Rp75.617.005.859**

Program		Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 51.947.264.859	APBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 118.993.232.108	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 7.802.114.000	APBD
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Rp 1.676.819.992	APBD
Jumlah Anggaran Keseluruhan Program (Utama dan Rutin)		Rp 180.419.430.959	APBD

Sumohai, 14 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI YAHUKIMO



DIDIMUS YAHULI, SH., MH

PIHAK PERTAMA
Dit. KEPALA DINAS KESEHATAN



**ASER SOBOLIM, S.K.M
PEMBINA Tk.I**

NIP. 197108091993121001